

**PENGARUH FUNGSI ANGGARAN DAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN  
BULUKUMBA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**MUHAMMAD ARWIN M  
2018MM11337**

**PROGRAM PASCASARJANA  
STIE NOBEL INDONESIA  
MAKASSAR  
2021**

**PENGESAHAN TESIS**

**PENGARUH FUNGSI ANGGARAN DAN FUNGSI  
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

**MUHAMMAD ARWIM M**

Menyetujui:

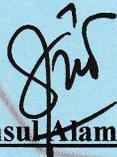
Telah dipertahankan di depan Penguji  
Pada tanggal 18 Maret 2021  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

**Komisi Pembimbing**

Ketua,

Anggota,

  
Dr Syamsul Alam, S.E., M.Si

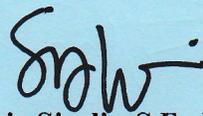
  
Dr. Drs. H. Muh. Said., M.M., M.AP.

*School Of Business* Mengetahui :

Direktur PPS  
STIE Nobel Indonesia,

Ketua Program Studi  
Magister Manajemen,

  
Dr. Marvadi, S.E., M.M.

  
Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

**HALAMAN IDENTITAS  
MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI**

JUDUL TESIS :

*PENGARUH FUNGSI ANGGARAN DAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN  
BULUKUMBA*

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARWIN M  
NIM : 2018MM11337  
Program Studi : Magister Manajemen  
Peminatan : Manajemen Pemerintahan Daerah

KOMISI PEMBIMBING :

Ketua : Dr. Syamsul Alam., S.E., M.Si  
Anggota : Dr. Drs. H. Muh. Said., M.M., M.AP

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. Ansar Daud., S.T., M.M  
Dosen Penguji 2 : Dr. Badaruddin., S.T., M.M

Tangga Ujian : 18 Maret 2021  
SK Penguji Nomor : 035/SK/PPS/STIE-NI/III/2021

## **MOTTO**

*“ Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”.*

**(Imam Syafi’i)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik tesis inidengan judul:“ **Pengaruh Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba**”. Di dalam tulisan ini,disajikan pokok-pokok, bahasan yang meliputi; fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah. Berakhirnya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesisini. Ucapan terimakasih ini khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. **Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M** Ketua STIE Nobel Indonesia.
2. **Dr. Maryadi, S.E., M.M** Direktur PPs STIE Nobel Indonesia.
3. **Dr.Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si.,Ak.,CA.** Ketua Program Studi Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia.
4. **Dr.Syamsul Alam, S.E.,M.Si** ketua komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran-saran hingga akhir penulisan tesis ini.
5. **Dr. Drs. H. Muh. Said., M.M.,M.AP.** anggota ketua komisi pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk hingga akhir penulisan tesis ini.

6. Segenap dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap Staf Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia atas bantuan yang telah diberikan.
8. Orang Tuaku Tercinta, segenap kasih sayang, semangat, dorongan moral dan doa restunya.
9. Segenap teman-Teman Pascasarjana Jurusan Manajemen Angkatan 2018
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan di dalam tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, Maret 2021

Penulis

Muhammad Arwin M

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur ciplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MENEJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ( Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70 )

Makassar, Maret 2021

**Mahasiswa Ybs,**



**MUHAMMAD ARWIN M**  
**2018MM11337**

## ABSTRAK

**Muhammad Arwin M.2021.** Pengaruh Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh Syamsul Alam dan Muh Said.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah pada sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba (2) pengaruh fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba (3) pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik sensus atau jenuh berjumlah 47 responden. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda, uji parsial (uji T) dan uji simultan (uji F).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,349 > 2.01537$ ) dan nilai sig ( $0,023 < 0,05$ ). (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,432 > 2.01537$ ) dan nilai sig ( $0,001 < 0,05$ ). (3) fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai  $F_{hitung} 19,735 > F_{tabel} 3,21$ . Dari kedua variabel tersebut diketahui variabel fungsi pengawasan berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai Beta ( $0,458$ ). Sedangkan R square diperoleh nilai bahwa pengaruh keseluruhan variabel X ke variabel Y sebesar 47,3%, sisanya sebesar 52,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, Kinerja Keuangan Daerah**



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine (1) the influence of the budget function on the regional financial performance at the DPRD Bulukumba Regency secretariat (2) the effect of the supervision function on the regional financial performance at the Bulukumba Regency DPRD secretariat (3) the influence of the budget function and the supervisory function jointly on Regional financial performance at the Bulukumba Regency DPRD Secretariat.*

*This research is a quantitative research with a descriptive approach. The sampling technique was census or saturated technique, amounting to 47 respondents. Hypothesis testing using multiple regression test, partial test (T test) and simultaneous test (F test).*

*The results showed that (1) there was a positive and significant influence of the budget function on regional financial performance where the  $t_{count} > t_{table}$  (2,349 > 2.01537) and the sig value (0.023 < 0.05). (2) there is a positive and significant effect of the supervisory function on regional financial performance where the value of  $t_{count} > t_{table}$  (3,432 > 2.01537) and sig value (0.001 < 0.05). (3) the budget function and the supervisory function simultaneously have an effect on financial performance. regions with  $F_{count} 19,735 > F_{table} 3,21$ . From these two variables, it is known that the supervision function variable has a dominant effect on regional financial performance with a Beta value (0.458). Meanwhile, the R square value shows that the overall effect of variable X on variable Y is 47.3%, the remaining 52.7% is influenced by other variables not included in this study.*

**Keywords: Budget Function, Supervision Function, Regional Financial Performance**



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAM</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Teory Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	10
2.3 Kajian Pustaka Fungsi Anggaran ( <i>Budgeting</i> ).....	12
2.4 Kajian Pustaka Fungsi Pengawasan .....	20
2.5 Kajian Pustaka Kinerja Keuangan Daerah.....	27
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>36</b>
3.1 Kerangka Pikir.....	36
3.2 Hipotesis Penelitian .....	37
3.3 Defenisi Opersional .....	38
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
4.1 Jenis Penelitian .....	39
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	39
4.4 Instrumen Penelitian .....	40
4.5 Pengukuran Variabel .....	40
4.6 Pengumpulan Data.....	40
4.7 Teknik Analisis Data .....	41
4.8 Uji Asumsi Klasik .....	42
4.9 Model Pengujian Hipotesis .....	44
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
5.2 Hasil Penelitian .....	51

<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
6.1 Kesimpulan .....	87
6.2 Saran-saran.....	87
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	53
Tabel 5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
Tabel 5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	55
Tabel 5.5	Uji Validitas Variabel.....	57
Tabel 5.6	Uji Realibilitas .....	58
Tabel 5.7	Analisis Perspesi Responden Terhadap Variabel Fungsi Anggaran ....	59
Tabel 5.8	Hasil Analisis deskriptif Variabel Fungsi Anggaran.....	61
Tabel 5.9	Gambaran Fungsi Anggaran .....	62
Tabel 5.10	Analisis Jawaban Responden Terhadap variabel Fungsi Pengawasan	63
Tabel 5.11	Hasil Analisis deskriptif Variabel Fungsi Pengawasan.....	65
Tabel 5.12	Gambaran Fungsi Pengawasan .....	66
Tabel 5.13	Analisis Jawaban Responden Terhadap Kinerja Keuangan Daerah ...	67
Tabel 5.14	Hasil Analisis deskriptif Variabel Fungsi Kinerja Keuangan Daerah.	69
Tabel 5.15	Hasil Uji Normalitas Data.....	70
Tabel 5.16	Hasil Uji Multikolinieritas .....	71
Tabel 5.17	Hasil Uji Heterokdesastiditas .....	72
Tabel 5.18	Hasil Uji Autokorelasi .....	74
Tabel 5.19	Hasil Uji Regresi Berganda .....	75
Tabel 5.20	Hasil Uji F (Simultan) .....	76
Tabel 5.21	Hasil Uji T (Parsial).....	77
Tabel 5.22	Hasil Uji Beta.....	78
Tabel 5.23	Hasil Uji Determinasi .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep.....	36
Gambar 5.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab Bulukumba.....	50
Gambar 5.2	Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Gambar 5.3	Persentase Responden Berdasarkan Jenis usia.....	53
Gambar 5.4	Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... ;...	54
Gambar 5.5	Persentase Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	55
Gambar 5.6	Grafik Scatterplot.....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Surat Izin Penelitian
- LAMPIRAN II : Kuesioner Penelitian
- LAMPIRAN III : Tabulasi Data
- LAMPIRAN V : Hasil Olah Data SPSS

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Pemerintah daerah memiliki konsep kinerja sendiri, dimana muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep pemerintahan yang baik yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau konsep pemerintahan yang ideal dalam pengelolaan urusan publik. Sebuah organisasi dapat dikatakan berhasil jika memiliki sebuah visi dan misi yang jelas serta terukur. Dengan kata lain bahwa visi dan misi tidak berarti atau bermakna ketika tidak teraktualisasikan atau dilaksanakan dalam kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan pemerintahan yang baik atau semestunya dengan kata lain *good governance* (Anggraeni, 2009).

Untuk mencapai suatu kinerja atau hasil kerja organisasi dengan baik, maka hal pertama yang diperlukan yaitu adanya sebuah perencanaan atau rencana kerja yang, terarah atau setiap step atau langkah-langkahnya jelas, dan komprehensif, sehingga dengan begitu maka akan memudahkan bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Hasil kerja tersebut akan disajikan dalam bentuk anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target atau sasaran yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan dari sebuah organisasi, yang

periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat.

Penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif atau tidak efisien dan tidak berorientasi pada hasil kerja maka bisa saja justru akan mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya atau aktualisasinya, dalam proses penyusunan anggaran seakan-akan hanya bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategic, sehingga keberhasilan pelaksanaan atau penerapan anggaran tidak sesuai dengan keberhasilan/kinerja program dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Dengan demikian maka hasil akhirnya yaitu tidak akan menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi (Basri, 2013)

Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah-pemerintah daerah, sama halnya dengan organisasi yang lain yang tentunya akan membuat sebuah perencanaan, dengan demikian langkah awal yang akan dilakukan yaitu membuat sebuah rencana anggaran dimana tetap mengikuti standar yang telah ditentukan utamanya dalam hal pencapaian tujuan sebuah organisasi (*budgetary goal characteristics*) . dengan demikian sangat

diharapkan perencanaan yang telah disusun dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil kerja dari seseorang pada instansi pemerintah daerah, karena ketika pemerintah daerah ingin berpartisipasi dalam menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan melakukan evaluasi tentang pencapaian anggaran yang telah ditentukan maka kinerjanya akan menjadi baik pula. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam melakukan penganggaran tentunya tidak luput dari adanya permasalahan yang terjadi pada tiap daerah, baik itu dalam proses penyusunan anggaran, pembahasan anggaran yang bisa dilakukan pada saat rapat anggota dewan beserta pemerintah daerah, sampai ditahap penetapan anggaran yang nantinya akan termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah, biasanya perhatian anggota dewan lebih terfokus pada nilai nominal dari sebuah anggaran, P anggaran secara *incremental*, nama kegiatan yang termuat dalam anggaran, dan siapa yang mengajukan anggaran (Subiyantoro, 2011). Menurut Fatikhah R (2013) hal ini merupakan salah satu bentuk dari kekuarangan dari sebuah perencanaan anggaran pada pemerintah daerah.

Untuk meminimalisir terjadinya sebuah permasalahan dalam penganggaran maka penting dilakukan adanya pengawasan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan terhadap APBD yang telah direncanakan atau tidak. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Adanya UU tentang otonomi daerah dimana isi dalam undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menuntuu untuk bisa menjadi *good governance*, dimana dalam hal ini harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Dewan) menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap SKPD (satuan kerja perangkat daerah ) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan tugas atau fungsi dari DPRD itu sendiri dimana bentuk upaya untuk menjamin adanya kesesuaian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2004). Menurut Halim (2004), pengawasan keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sebuah kegiatan yang bertujuan menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan

pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah, anggota dewan dapat melakukan pengawasan pencegahan yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 mengatur tentang Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan, dimana menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara disiplin, patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas *pravelent* atau tidak membedakan golongan tertentu. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri (Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, 2012).

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setelah menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yaitu melakukan pengukuran kinerja dimana bertujuan untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Salah satu bentuk dari penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dimana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dimana berfungsi sebagai sebuah informasi yang sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94).

Menurut Chow, dkk (1998) Pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat penting, karena dengan adanya pengukuran kinerja maka akan memberikan *feedback* atas rencana yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Observasi awal yang dilakukan calon peneliti mengemukakan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD khususnya DPRD Kabupaten Bulukumba belakangan ini terkait fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Berdasarkan observasi yang dilakukan terkait masalah fungsi anggaran yaitu terkadang pemerintah daerah menganggarkan hal-hal yang tidak semestinya dianggarkan atau lebih mendahulukan yang bukan sifatnya wajib daripada yang wajib dianggarkan. Adapun masalah yang ditemukan pada fungsi pengawasan di Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba yaitu pengawasan DPRD masih kurang maksimal, karena

terkadang tidak mengetahui adanya kebocoran anggaran dilapangan. DPRD Kab.Bulukumba baru mengetahui ketika sudah ada demo di kantor DPRD Kab.Bulukumba terkait adanya kebocoran anggaran.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta empirik dan regulasi yang mendasari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat dan menganalisis “Pengaruh Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba?
2. Apakah fungsi pengawasan DPRD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba?
3. Apakah fungsi anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk Menganalisa pengaruh fungsi anggaran terhadap terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk Menganalisa pengaruh fungsi pengawasan kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

3. Untuk menganalisa pengaruh fungsi anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti, antara lain :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Memberi tambahan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam kinerja keuangan daerah di DPRD Kab.Bulukumba agar lebih efektif dan efisien.

##### **b. Manfaat Bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna meningkatkan fungsi dari DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kinerja keuangan daerah dapat sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

##### **c. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengetahui pentingnya fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam melakukan kinerja keuangan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Mengumpulkan beberapa jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan di teliti. Sehingga pada dasarnya sangat penting dalam melakukan pengkajian pustaka atau literature-literatur karena mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan di teliti dengan kajian yang sudah di lakukan terhadap literatur penelitian untuk membedakan dengan objek kajian yang sekarang. Sehingga pada bab ini membuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

##### **a. Espinoza (2014)**

Penelitian yang dilakukan oleh Espinoza tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2014” hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa data yang digunakan menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya anggaran berbasis kinerja ternyata mengarah kepada peningkatan yang positif.

##### **b. Febrina Astria Verasvera (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Febrina tentang “ Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi

Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2016” hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis  $t_{hitung} 7,1150 > t_{tabel} 1,6707$  maka dapat disimpulkan ada hubungan signifikan dan positif.

**c. Novita Lerly Djiloli (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Novita tentang “Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SPKD Pemda Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016” hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig  $0,000 < 0,05$ .

**d. Fifit dan Nadirsyah (2016)**

Penelitian yang dilakukan fifit dan nadirsyah tentang “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemda Pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016” hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengawasan keuangan daerah yaitu  $0,003 < 0,05$  artinya ada hubungan signifikan.

## **2.2 Teory Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi (*agency theory*) adalah suatu fenomena dimana atasan akan memberikan tugasnya untuk diselesaikan kepada bawannya atau otoritas untuk membuat sebuah keputusan (Anthony dan Govindarajan, 1998 dalam Latuheru, 2005). Hubungan vertical pemerintah daerah antara atasan dan bawahan, dimana bawahan memiliki tugas melakukan proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan atas anggaran daerah dengan

membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah , sedangkan atasan berperan dalam melaksanakan pengawasan (Sundari, 2015).

Yang menjadi dasar dalam melaksanakan pelayanan publik yaitu anggaran daerah, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah disebut juga sebagai dokumen anggaran daerah, mulai dari tingkat pusat atau provinsi, kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Dalam Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, pegawai bertindak sebagai *agent* dan Kepala SKPD dan Kepala Badan bertindak sebagai *principal*.

Langkah awal yang dilakukan dalam proses penyusunan APBD yaitu terlebih dahulu melakukan rapat atau pertemuan dimana dibuat kesepakatan antara pemerintah eksekutif dan legislatif tentang tahapan dan kebijakan umum serta apa yang menjadi prioritas dari sebuah anggaran, dimana nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD (anggaran pendapatan dan anggaran belanja). Tugas dari pemerintah eksekutif yaitu membuat rancangan atau perencanaan APBD sesuai dengan format hasil pembicaraan dan prioritas anggaran, yang selanjutnya akan diberikan kepada legislative atau anggota dewan untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Implikasinya dalam penelitian ini yaitu eksekutif sebagai agen yang

melakukan perencanaan dan evaluasi anggaran serta penetapan standar biaya akan diawasi oleh legislatif selaku *principal* atau wakil rakyat. Eksekutif (agen) yang telah diberikan wewenang oleh Legislatif (Principal) untuk melakukan perencanaan dan evaluasi anggaran serta penetapan standar biaya akan diawasi oleh legislatif selaku *principal* atau wakil rakyat. Eksekutif (agen) yang telah diberikan wewenang oleh Legislatif (Principal) untuk melakukan kinerja keuangan daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan (Haslinda, 2016).

## **2.3 Kajian Pustaka Fungsi Anggaran (*Budgeting*)**

### **2.3.1 Pengertian Anggaran**

Menurut Munandar (2010) menyatakan Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Anggaran sektor publik adalah suatu rencana yang telah disusun secara baik atau komprehensif, dimana meliputi semua kegiatan organisasi sektor public untuk jangka waktu atau periode tertentu biasanya satu tahun anggaran. Anggaran sektor publik mencakup tentang rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik telah termuat dalam sebuah dokumen dimana menggambarkan tentang situasi atau kondisi keuangan dari organisasi tersebut. Dimana yang meliputi informasi mengenai pendapatan,

belanja, dan aktivitas, dan berisi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

### **2.3.2 Fungsi Anggaran**

Mardiasmo dalam Halim (2012) ada beberapa fungsi anggaran dalam menejemen sektor publik, yaitu :

#### **a. Alat Perencanaan**

Anggaran sektor public berfungsi sebagai alat perencanaan maksudnya yaitu membuat perencanaan atau merencanakan, hal apa yang akan dilakukan oleh suatu organiasi sektor publik yakni pemerintah, banyaknya biaya yang diperlukan, dan hasil yang nantinya diperoleh.

#### **b. Alat Pengendalian**

Anggaran sektor public berfungsi sebagai alat pengendalian yaitu dimana anggaran ini memberikan suatu rencana secara rinci tentang pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran pemerintah agar nantinya mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik.. Hal ini digunakan untuk lebih mengefesiensikan anggaran kegiatan yang menjadi perioritas..

#### **c. Alat Kebijakan Fiskal**

Anggaran dalam sektor publik berfungsi senagai alat kebijakan fiskal maksudnya yaitu menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat.

d. Alat Politik

Anggaran dalam sektor publik sebagai alat politik merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah pusat dan kesepakatan anggota dewan atas penggunaan dana publik. Kegagalan dalam implemementasi anggaran yang telah disepakati maka akan menjatuhkan kepemimpinan dan menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran dalam sektor publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam suatu pemerintahan. Disamping itu, berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas suatu program atau kegiatan. Kinerja manajemen publik akan dinilai berdasarkan hasil pencapaian yang dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran sektor publik berguna sebagai alat motivasi manager dan stafnya agar mampu bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target anggaran yang ditentukan. Dalam hal ini, anggaran yang ditentukan sebaiknya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah.

#### h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran dalam sektor publik dapat melibatkan masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kurang terorganisasi.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran dibagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti belanja rutin yang dilakukan oleh organisasi. Anggaran ini digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun.

#### b. Anggaran Modal

Anggaran modal adalah suatu rencana jangka panjang dimana untuk pembelanjaan aktiva tetap bagi organisasi. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang memang diperlukan dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan pemerintah. anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan pemerintah.

### 2.3.4 Prinsip-prinsip Anggaran

Mardiasmo (2009) menyebutkan prinsip-prinsip anggaran adalah :

#### a. Otorisasi Oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh eksekutif.

b. Komprehensif

Anggaran publik harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

c. Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

d. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah anggaran yang disetujui oleh dewan legislatif harus memanfaatkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai inefisiensi anggaran.

g. Jelas

Anggaran publik hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui Publik

Anggaran publik harus di informasikan kepada masyarakat luas.

### **2.3.5 Proses Penyusunan Anggaran**

Anggaran yang dipresentasikan setiap tahun memberikan informasi rinci tentang program apa saja yang direncanakan oleh

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai (Mardiasmo, 2009). Mardiasmo (2009) mengatakan proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

- a. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar masing-masing bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan/atau jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2011:70) menjelaskan siklus anggaran sektor publik melalui tahapan sebagai berikut:

**a. Tahap persiapan anggaran**

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

**b. Tahap ratifikasi**

Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan

untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

**c. Tahap pelaksanaan anggaran**

Dalam tahap ini yang paling penting adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

**d. Tahap pelaporan dan evaluasi**

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

**2.3.6 indikator-indikator Anggaran**

Menurut Anggasta dan Murtini (2014), ada Beberapa indikator anggaran sebagai berikut :

**a. Standar anggaran**

Standar anggaran merupakan sebuah acuan yang digunakan dalam penetapan suatu anggaran disusun.

b. Sasaran anggaran

Sasaran anggaran adalah sejauh mana anggaran ditetapkan dan spesifik dengan tujuan anggaran.

c. Target anggaran

Target anggaran adalah tujuan dari suatu anggaran yaitu terlaksananya anggaran yang telah disusun.

Beberapa indikator anggaran dari penelitian yang dilakukan oleh Ardila (2013) adalah sebagai berikut :

- a. Standar yang digunakan adalah acuan dalam penetapan suatu anggaran.
- b. Pelaksanaan Anggaran adalah suatu tahap implementasi atau aktualisasi setelah anggaran disetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat.
- c. Pengawasan Anggaran adalah Anggaran dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan fungsi pengawasan anggaran.
- d. Pertanggung jawaban Anggaran adalah mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan tujuan atau tidak
- e. Target Anggaran adalah suatu tujuan dari anggaran yaitu terealisasinya anggaran yang telah disusun.
- f. Realisasi Anggaran adalah biaya yang dikeluarkan ketika dibelanjakan.

Sehingga dapat disimpulkan indikator dari variabel anggaran tidak lepas dari target anggaran, sasaran anggaran, dan realisasi anggaran serta pertanggung jawaban yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Indikator digunakan sebagai acuan untuk membatasi atau memperjelas bagian apabila terjadi kesenjangan anggaran.

## **2.4 Kajian Pustaka Fungsi Pengawasan**

### **2.4.1 Pengertian Fungsi Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan ,baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal - hal yang diawasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2007) Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap

pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana - rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan - tujuan perusahaan dapat terselenggara.

#### **2.4.2 Tujuan Pengawasan**

Menurut Sule dan Saefullah (2005 :318-319) ada empat tujuan pengawasan yang meliputi :

- a. adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.
- b. Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
- c. Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan .
- d. produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
- e. Meminimumkan biaya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
- f. Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Menurut Siswandi (2009 ) bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi

- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi.
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja
- f. aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 1995) adalah

- a. untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang
- b. digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi
- c. serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah :

- a.** Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.

- b. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- c. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

#### **2.4.3 Syarat-syarat Pengawasan Yang Efektif**

Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam Fitrianingrum (2015) yaitu :

**a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang**

Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan /menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.

**b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya**

Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.

**c. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan- penyimpangan pada hal-hal yang penting**

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.

**d. Pengawasan harus objektif**

Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya.

**e. Pengawasan harus luwes (fleksibel)**

Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.

**f. Pengawasan harus hemat**

Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relative hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan,

pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.

**g. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action)**

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.

#### **2.4.4 Indikator-indikator Pengawasan**

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) pengawasan terdiri dari empat indikator yaitu :

- a. Menetapkan standar (*Standards*)** yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
- b. Pengukuran (*Measurement*)** yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

- c. **Membandingkan (*Compare*)** adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- d. **Melakukan tindakan (*Action*)** adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Menurut Handoko (2009) indikator - indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut :

**a. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan**

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

**b. Pengukuran kerja**

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia - sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.

Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah :

- 1) Pengamatan
- 2) Laporan - laporan hasil lisan atau tertulis
- 3) Metode - metode otomatis
- 4) Pengujian atau dengan pengambilan sample

**c. Penilaian kinerja**

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

**d. Tindakan koreksi**

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawasan.

## **2.5 Kajian Pustaka Kinerja Keuangan Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsure laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator

keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

### **2.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014).

Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2011):

- a. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **2.5.3 Indikator-indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Indikator kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2012) indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

- a. Indikator *Input* misalnya :
  - 1) Besarnya dana yang dibutuhkan
  - 2) Banyaknya pegawai yang dibutuhkan

- 3) Jumlah infrastruktur yang ada
  - 4) Banyaknya waktu yang digunakan
- b. Indikator *Process* misalnya :
- 1) Patuh terhadap peraturan perundangan yang telah ditetapkan
  - 2) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
- c. Indikator *Output*, misalnya :
- 1) Jumlah produk dan jasa yang dihasilkan
  - 2) Ketepatan waktu dalam memproduksi barang dan jasa
- d. Indikator *Outcome*, misalnya :
- 1) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - 2) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- e. Indikator *Benefit* misalnya :
- 1) Tingkat kepuasan masyarakat
  - 2) Tingkat keikutsertaan masyarakat
- f. Indikator *Impact*, misalnya :
- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - 2) Peningkatan pendapatan masyarakat

Selain itu Ratminto dan Atik (2007 ) mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja bisa menggunakan dua jenis indikator, yaitu indikator yang berorientasi pada proses atau indikator yang berorientasi pada hasil. Ukuran yang berorientasi pada proses adalah sebagai berikut :

**a. Responsivitas**

Adalah kemampuan penyedia dalam mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, melkaukan penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan suara masyarakat. mengukur daya tanggap penyedia terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan pelanggan.

**b. Responsibilitas.**

Responsilibiltas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

**c. Akuntabilitas**

Adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintahan dengan ukuran ukuran *eksternal* yang ada di masyarakat dan dimiliki *stakeholders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

**d. Keadaptasian**

Adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dilingkungan.

**e. Kelangsungan hidup**

Artinya seberapa jauh pemerintah atau program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain.

**f. Keterbukaan atau transparansi**

Ukuran keterbukaan atau transparansi adalah bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak.

**g. Empati**

Adalah perlakuan atau perhatian pemerintah atau penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat.

Adapun indikator yang berorientasi pada hasil menurut Ratminto dan Atik (2007).

**a. Efektivitas**

Tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi publik. Akan tetapi pencapaian tujuan organisasi publik ini harus juga mengacu pada visi organisasi.

**b. Produktivitas**

Ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi publik untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**c. Efisiensi**

Perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. Idealnya organisasi publik harus mampu menyelenggarakan suatu jenis

pelayanan tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang sesedikit mungkin.

**d. Kepuasan**

Seberapa jauh organisasi publik dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat.

**e. Keadilan**

Cakupan atau jangkauan kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

#### **2.5.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mohamad Mahsun (2012:135), analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan

yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut : DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah selaku manajer eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah ada berbagai macam. Salah satunya adalah analisis surplus/defisit APBD. Analisis surplus defisit APBD adalah salah satu tugas menteri keuangan dirjen perimbangan keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Tugas ini tercermin dalam PP 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No.45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006.

Hasil analisis tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional untuk tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan analisis difokuskan pada ketaatan pada kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta komposisi penyebaran dalam skala defisit yang diperbolehkan dan surplus pada masing-masing pemerintahan daerah.

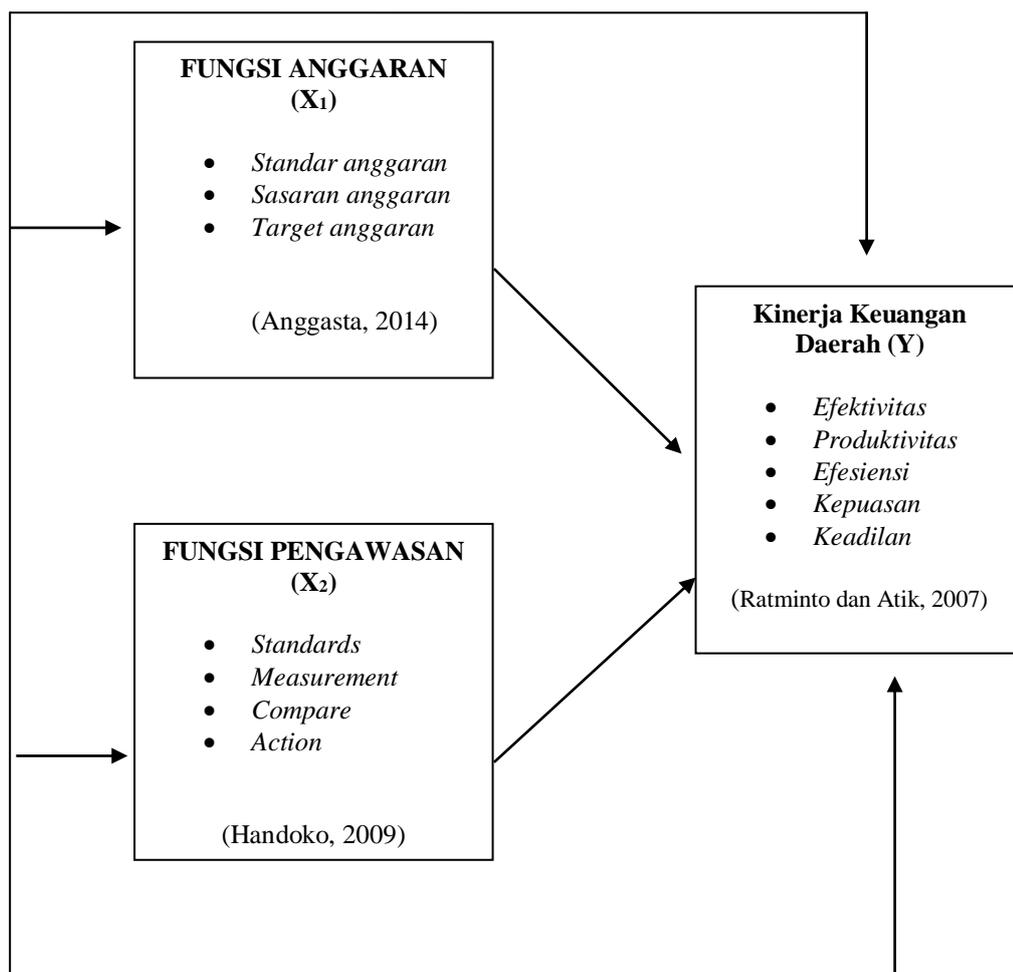
Analisis ini juga menyajikan dua pendekatan dalam penentuan defisit yaitu pertama pendekatan dasar sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 adalah selisih antara pendapatan dan belanja, sedangkan definisi defisit pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No.72 Tahun 2006 adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.

## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran teoritis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba yang disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :



**Gambar 5.1 Kerangka Konsep**

### **3.2 Hipotesis Penelitian**

Mengacu pada tinjauan pustaka dan kerangka konsep yang telah dijelaskan di atas, maka dikemukakan beberapa hipotesis penelitian, yaitu:

1. Diduga Fungsi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
2. Diduga Fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
3. Diduga Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

### 3.3 Defenisi Opersional

#### 1. Variabel Independen

- a. Fungsi anggaran merupakan DPRD dan pemerintah daerah secara bersama-sama menyusun APBD. Adapun indikator-indikator fungsi anggaran yaitu standar anggaran, sasaran anggaran dan target sasaran. Alat ukur yang digunakan yaotu kuesioner dan pengukurannya menggunakan Skala Likert.
- b. Fungsi pengawasan merupakan Proses yang dilakukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai mestinya (proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD). Adapun indikator-indikator fungsi pengawasan yaitu *Standards, Measurement, Compare dan Action..* Alat ukur yang digunakan yaotu kuesioner dan pengukurannya menggunakan Skala Likert.

#### 2. Variabel Dependenden

Kinerja Keuangan daerah adalah Hasil dari suatu program yang telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Adapun indikator-indikator kinerja keuangan daerah *Efektivitas, Produktivitas, Efisiensi, Kepuasan dan Keadilan.* Alat ukur yang digunakan yaotu kuesioner dan pengukurannya menggunakan Skala Likert.

## **BAB IV**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu memperoleh data dari hasil pembagian kuesioner kepada responden yang nantinya akan diolah dengan menggunakan program computer aplikasi SPSS versi 22.

#### **4.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian dilakukan mulai selama November sampai dengan Desember 2020

#### **4.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **4.3.1 Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh adalah seluruh anggota dewan di Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba berjumlah 38 orang anggota dewan dan 9 orang staf keuangan di Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba.

### **4.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Proses pengambilan sampel dengan teknik sensus atau jenuh yaitu 38 orang anggota dewan.

## **4.4 Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner dimana terbagi atas enam bagian kuesioner. Bagian pertama kuesioner untuk mengetahui identitas responden dan mengetahui gambaran secara umum subjek. Alat ukur penelitian ini berbentuk kuesioner (angket).

## **4.5 Pengukuran Variabel**

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert sebagai alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (sugiyono, 2010). Penelitian memberikan lima alternative jawaban kepada responden dengan skala 1 sampai 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian, dengan alternative jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Kurang Setuju (KS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1.

## **4.6 Pengumpulan Data**

### **4.6.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih sebagai sampel penelitian, dengan melakukan survey, dimana responden diberi kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diisi.

#### 4.6.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, dan juga internet untuk mendukung penelitian ini.

#### 4.7 Teknik Analisis Data

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu instrumen penelitian (kuesioner) dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat kevalidan dan tingkat reliabilitas dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

##### a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauhmana suatu alat ukur diyakini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur item-item pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dalam penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/pernyataan kuesioner adalah *korelasi product moment* dari *Kart Pearson*, dengan ketentuan bahwa : jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka score butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner valid, tetapi sebaliknya jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka score butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner tidak valid.

##### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur tingkat kompetensi antara hasil pengamatan dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas pengamatan adalah dengan menggunakan koefisien *cronbach alpah* lebih

besar dari 0,60. Ghozali (2006) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alphas* > 0,60.

#### **4.8 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi :

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan histogram dan kurva penyebaran *probabiliry plot (P-plot)*. Melalui pola penyebaran *P-plot*, data dikatakan berdistribusi normal jika pola penyebaran memiliki garis normal atau garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

##### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat *Vif (Variance Inflation Factor)* dan nilai *Tolerance*. Jika *Vif* > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,10 maka terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2006).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variable dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap maka disebut homoskestisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskestisitas, atau dengan kata lain tidak terjadi adanya Heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Selain itu, Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2006).

### d. Uji Autokorelasi

Menguji Autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *Durbin-Watson (DW)*. Jika nilai *Durbin-Watson* terletak antara  $-2$  sampai  $+2$ , maka tidak terjadi Autokorelasi (Ghozali, 2006).

#### 4.9 Model Pengujian Hipotesis

##### a. Uji F (uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh 2 variabel secara bersama-sama yaitu variabel Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap variabel kinerja keuangan daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bulukumba.

##### b. Uji T (Pasrial)

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (Fungsi anggaran dan Fungsi Pengawasan) dan variabel dependen (kinerja keuangan daerah) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bulukumba.

##### c. Uji Regresi Berganda

Teknik analisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisisregresi linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) yang ditunjukkan oleh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukkan oleh kinerja keuangan daerah. Rumus yang digunakan dari Sudjana (2012), adalah :

$$Y = a + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan

X1 :Implementasi SAP

X2 : Kompetensi SDM

X3 : Teknologi Informasi

$\beta$  : Koefisien Regresi

a : Konstanta

e : Error

**d. Uji Beta ( $\beta$ )**

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi.

**e. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossesction) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2013).

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **5.1.1 Gambaran Umum tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat**

###### **Daerah Kab. Bulukumba**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bulukumba merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelayanan administratif Anggota DPRD. Adapun Tugas Pokok Sekretaris DPRD Sebagai berikut

:

- a. Mengoordinasikan perumusan rencana strategis Sekretariat DPRD.

- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kewenangan Sekretariat DPRD.
- c. Mengoordinasikan pelayanan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD.
- d. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD.
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.
- f. Menyelenggarakan urusan umum Sekretariat DPRD.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Sekretariat DPRD.
- h. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kewenangan Sekretariat DPRD.
- i. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan,

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi tiga Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian sebagai berikut:

**A) Bagian Umum**

Bagian Umum di pimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, mengkoordinasikan Pelayanan, Merumuskan, Memantau dan mengevaluasi, penyelenggaraan Urusan Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Perlengkapan Aset dan Rumah Tangga, serta Sub. Bagian Humas dan Protokol.

**B) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Pimpin oleh Kepala Bagian dengan tugas pokok Membantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengkoordinasikan pelayanan, merumuskan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya membawahi Sub. Bagian Rapat dan Risalah, Sub. Bagian Perundang-undangan dan Sub. Bagian Aspirasi.

### **C) Kepala Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan pelayanan, merumuskan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Sekretariat DPRD.

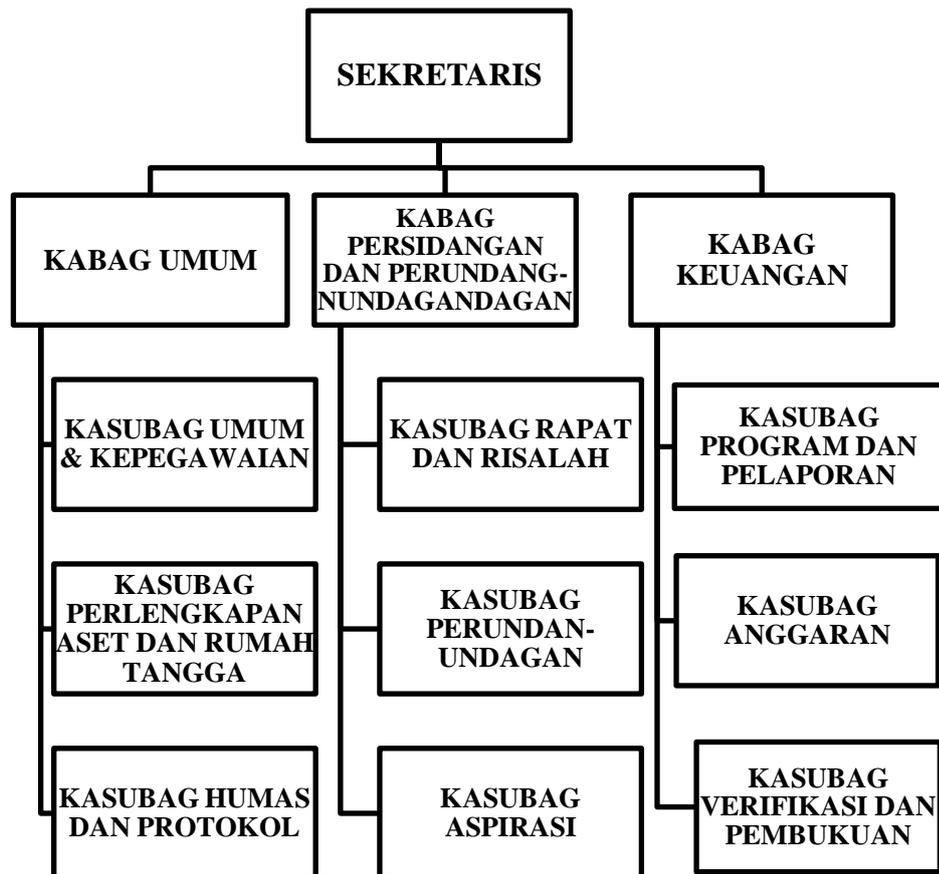
## **5.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat**

### **Daerah Kabupaten Bulukumba**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba secara umum memiliki struktur organisasi yang dimana menggambarkan seluruh bagian dari unit-unit kerja yang saling berkaitan, berikut adalah gambaran struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba:

Gambar 5.1

**Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.  
Bulukumba**



## 5.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yaitu sebanyak 47 responden yang telah diolah menggunakan program SPSS 22. Adapun hasil yang didapat yaitu, deskripsi karakteristik responden, uji validasi dan reliabilitas, uji asumsi dan uji pnegaruh (Uji Regresi Berganda,Uji F, Uji T, Uji Beta dan Uji Determinasi).

### 5.2.1 Karakteristik Responden

Pada bagian akan disajikan gambaran deskriptif obyek penelitian untuk mendukung analisa kuantitatif. Sebelum membahas deskriptif masing-masing variabel penelitian yang diamati, maka terlebih dahulu akan disajikan karakteristik responden yang meliputi: umur responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja. Dari 47 kuesioner yang disebarkan,semuanya berhasil dikumpulkan dan dinyatakan layak untuk dianalisa lebih lanjut. Hasil pengamatan peneliti tentang karakteristik responden dapat disajikan sebagai berikut:

#### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 5.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden (orang)</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	34	72,3
Perempuan	13	27,7
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

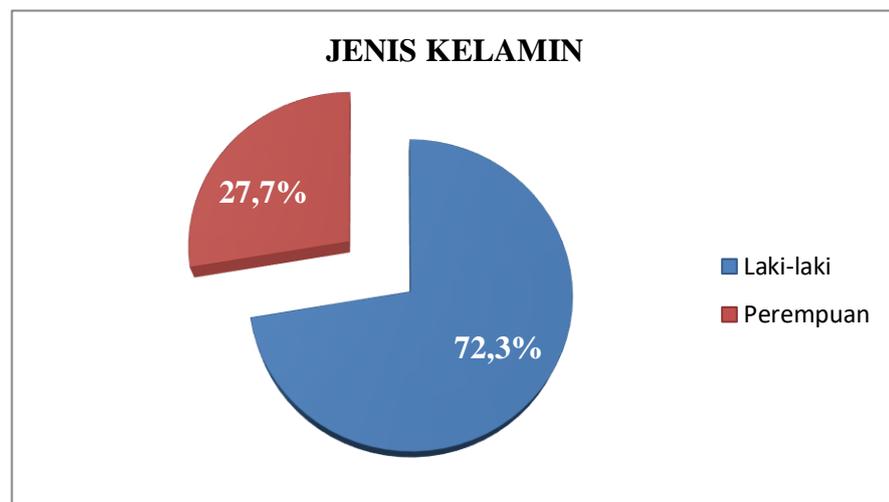
*Sumber:Data Primer diolah pada SPSS 22,2020.*

Pada tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 34 orang dengan persentase sebesar 72,3%,

sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 27,7%.

Persentase responden berdasarkan jenis kelamin juga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 5.2 persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Pada gambar 5.2 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dari penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 5.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
23-32	6	12,7
33-42	13	27,7
43-52	11	23,4
53-62	13	27,7
63-71	4	8,5
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

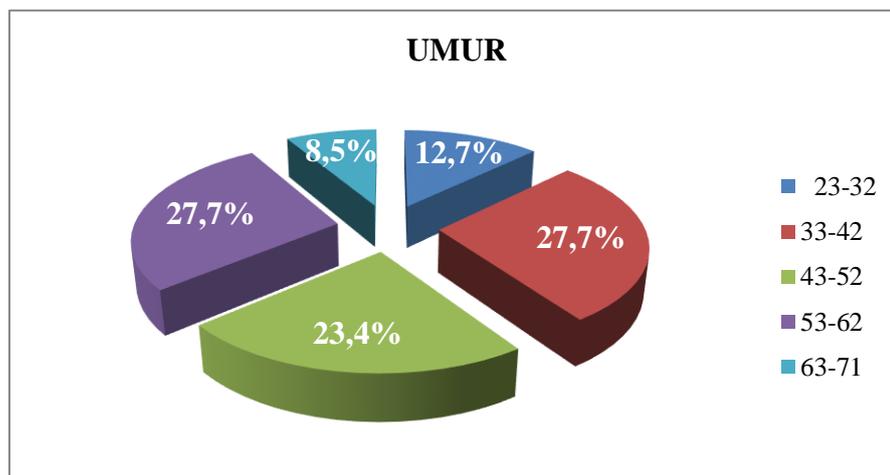
*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020*

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa responden yang berusia 23-32 berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 12,7%, kemudian

usia 33-42 sebanyak 13 responden dengan persentase 27,2%, usia 43-52 sebanyak 11 responden dengan pesentase sebesar 23,4%, pada kelompok usia 53-62 sebanyak 13 reponden dengan persentase 27,7%, dan kelompok usia 63-71 sebanyak 4 responden dengan persentase sebesar 8,5%.

Presentase responden berdasarkan usia juga dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 5.3 Persentase Responden Berdasarkan Usia**



Pada tabel 5.3 diatas dapat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur dari responden dalam penelitian ini yaitu usia 33-42 dan usia 53-62.

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 5.3  
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
Tamat SMA/Sederajat	8	17
Tamat Diploma (D3)	3	6,4
Tamat Strata-1 (S1)	26	55,3
Tamat Megister (S2)	10	21,3

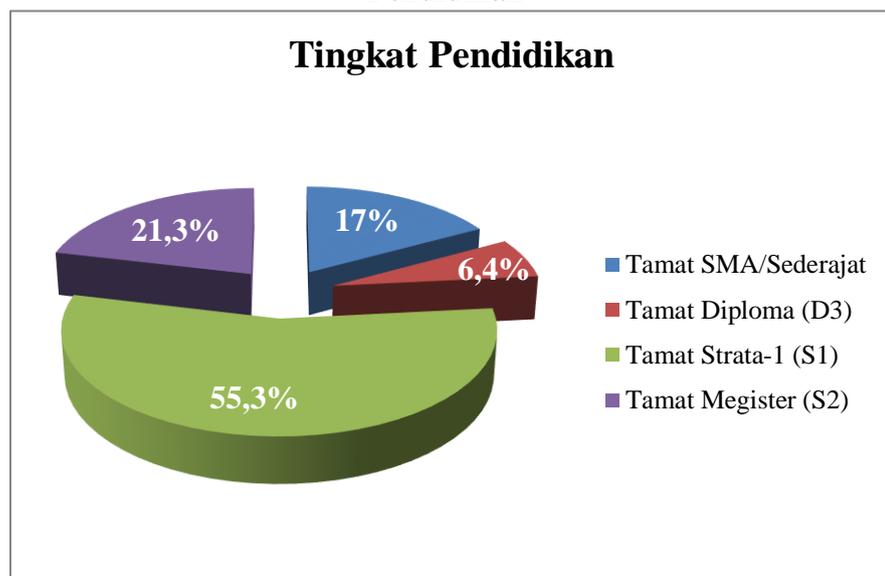
Pendidikan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Pada tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan tamat SMA yaitu sebanyak 8 orang, dengan persentase sebesar 17%, responden dengan tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 6,4%, responden dengan tingkat pendidikan sarjana atau strata-1 (S1) sebanyak 26 orang responden dengan persentase 55,3% dan responden dengan tingkat pendidikan megister (S2) sebanyak 10 orang dengan persentase 21,3%.

Persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 5.4 Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Pada tabel 5.4 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini tingkat pendidikannya yaitu strata 1 atau Sarjana.

#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

**Tabel 5.4**  
**Responden Berdasarkan Masa Kerja**

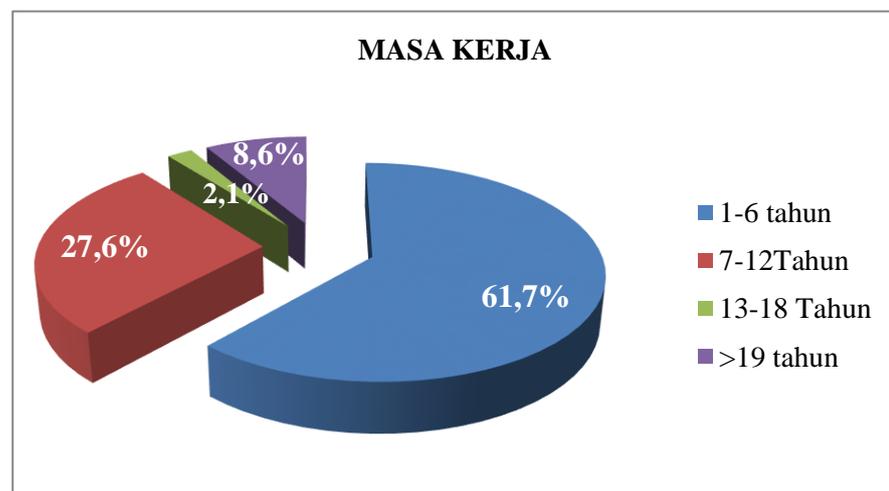
Masa Kerja	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1-6 tahun	29	61,7
7-12Tahun	13	27,6
13-18 Tahun	1	2,1
>19 tahun	4	8,6
<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa masa kerja 1-6 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 61,7 %, masa kerja 7-12 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 27,6% dan masa kerja 13-18 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,1% serta masa kerja >19 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 8,6%.

Persentase responden berdasarkan masa kerja juga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 5.5 persentase Responden Berdasarkan Masa Kerja**



Pada tabel 5.5 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau kebanyakan masa kerja responden dalam penelitian ini yaitu 1-6 tahun.

## **5.2.2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas**

### **1. Uji Validitas Variabel**

Uji validitas prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Pengujian validitas dan reliabilitas instrument penelitian dilakukan terhadap 47 sampel yang merupakan 38 anggota DPRD dan 9 pegawai aparatur sipil negara pada Bagian Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kab. Bulukumba. Pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, sementara hasil penelitian dikatakan reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013).

Apabila item pertanyaan mempunyai  $r$  hitung > dari  $r$  tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel  $(N)=47$  responden dan besarnya  $df$  dapat dihitung  $47-2 = 45$  dengan  $df=44$  dan  $\alpha = 0,05$ , didapat  $r$  tabel =0,288, jadi item pertanyaan yang valid mempunyai  $r$  hitung  $> 0,288$ . Adapun hasil uji validasi data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5**  
**Uji validitas variabel**

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Fungsi Anggaran	X1.1	0,728	0,288	<b>Valid</b> ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ )
	X1.2	0,787		
	X1.3	0,686		
	X1.4	0,673		
	X1.5	0,623		
	X1.6	0,516		
	X1.7	0,662		
Fungsi Pengawasan	X2.1	0,746	0,288	<b>Valid</b> ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ )
	X2.2	0,667		
	X2.3	0,520		
	X2.4	0,698		
	X2.5	0,566		
	X2.6	0,604		
	X2.7	0,430		
Kinerja keuangan daerah	Y1	0,514	0,288	<b>Valid</b> ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ )
	Y2	0,534		
	Y3	0,652		
	Y4	0,631		
	Y5	0,672		
	Y6	0,619		
	Y7	0,637		

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan (fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan kinerja keuangan daerah) memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

## 2. Uji Realibilitas Variabel

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu .

Adapun pengujian reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* yang apabila nilai *Cronbach's Alpha*  $>0,60$  maka dinyatakan reliabel. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas pernyataan dalam setiap variable dengan menggunakan program SPSS 22:

**Tabel 5.6**  
**Uji Realibilitas Variabel**

No	Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	N of item	Keterangan
1	Fungsi Anggaran	0,782	7	reliabel
2	Fungsi Pengawasan	0,701	7	reliabel
3	Kinerja Keuangan Daerah	0,711	7	reliabel

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020*

Pada tabel diatas dapat dilihat pada variabel Fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan kinerja keuangan daerah memiliki nilai *cronbach's alpha*  $>0,60$  maka dapat dinyatakan semua variabel dan item pernyataan dikatakan reliabel.

### 5.2.3 Analisis Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan sebagai variabel bebas (independen) dan variabel Kinerja keuangan daerah sebagai variabel terikat (dependen). Analisis persepsi responden terhadap variabel tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Fungsi Anggaran

Hasil pengamatan peneliti tentang analisis persepsi responden terhadap variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Persepsi Responden Terhadap Variabel Fungsi Anggaran**

Item	Jumlah					Jumlah	Persentase %					Jumlah (%)
	STS	TS	KS	S	SS		STS	TS	KS	S	SS	
P1	0	0	6	26	15	47	0	0	12,8	55,3	31,9	100
P2	0	1	2	22	22	47	0	2,1	4,3	46,8	46,8	100
P3	0	0	0	26	21	47	0	0	0	55,3	44,7	100
P4	0	0	6	26	15	47	0	0	12,8	55,3	31,9	100
P5	1	2	10	22	12	47	2,1	4,3	21,3	46,8	25,5	100
P6	0	0	2	30	15	47	0	0	4,3	63,8	31,9	100
P7	0	1	4	27	15	47	2,1	0	8,5	57,5	31,9	100

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020.*

Pada tabel 5.7 pada variabel Kedisiplinan adapun hasil kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Jumlah responden menjawab pernyataan 1 (Pada penyusunan anggaran mengikuti acuan atau pedoman dalam penetapan suatu anggaran), sebanyak 6 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 26 responden menjawab Setuju (S) dan 15 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- b. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 (penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD. Agar legislatif mampu memberikan argumen yang rasional atas pertanyaan atau bantahan terkait APBD) sebanyak 1 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 2 responden

menjawab Kurang Setuju (KS), dan 22 responden menjawab Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

- c. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 (Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah) sebanyak 26 responden menjawab Setuju (S) dan 21 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- d. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 (Penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan mencapai tujuan secara efektif) sebanyak 6 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 26 responden menjawab Setuju (S) dan 15 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- e. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 5 (Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan secara efektif yang telah disepakati) sebanyak 1 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 2 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 10 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 22 responden menjawab Setuju (S) dan 12 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- f. pada pernyataan 6 (Anggaran selalu terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai), sebanyak 2 responden

menjawab Kurang Setuju (KS), 30 responden menjawab Setuju (S) dan 15 orang menjawab Sangat Setuju (SS)

- g. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 7 (Target yang dimasukkan dalam anggaran sangat mudah dijangkau atau tercapai) sebanyak 1 responden menjawab Tidak Setuju (STS), 4 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 27 responden menjawab Setuju (S) dan 15 responden menjawab Sangat Setuju (SS).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 47 orang responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban responden terhadap jawaban variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.8**  
**Hasil analisis Deskriptif Variabel Fungsi Anggaran**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL.X1	47	23	35	29.57	3.084
Valid N (listwise)	47				

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22*

Dapat dilihat dari tabel yang ada diatas, diperoleh hasil untuk variabel Fungsi Anggaran dengan jumlah responden 47 orang, nilai rata-rata 29,57. Nilai minimum 23 dan nilai maksimum 35. Dengan demikian indikator atau pernyataan mengenai fungsi anggaran menuju arah maksimum. Maka dapat disimpulkan indikator atau

pernyataan dapat dinilai baik. analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel fungsi anggaran.

Untuk lebih mengetahui gambaran fungsi anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba maka dibuat lima kategori dengan pedoman sebagai berikut Azwar (2012)

Sangat Rendah	$X \leq M - 1,5SD$
Rendah	$M - 1,5SD < X \leq M - 0,5SD$
Sedang	$M - 0,5SD < X \leq M + 0,5SD$
Tinggi	$M + 0,5SD < X \leq M + 1,5SD$
Sangat Tinggi	$M + 1,5SD < X$

Keterangan M: mean

SD: Standar Deviasi

**Tabel 5.9**  
**Gambaran Fungsi Anggaran**

	Frequency	Percent
Valid sangat rendah	7	14.9
rendah	4	8.6
sedang	22	46.6
tinggi	14	29.9
Total	47	100.0

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22*

Dari tabel diatas dapat diketahui ada 7 orang yang mempersepsi fungsi anggaran sangat rendah (14,9%), ada 4 orang mempersepsi fungsi anggaran rendah (8,6%), ada 22 orang mempersepsi fungsi anggaran sedang (46,6%) dan ada 14 orang mempersepsi fungsi anggaran tinggi (29,9%). Maka dapat diketahui bahwa fungsi anggaran anggota dewan di sekretariat DPRD Kab.Bulukumba dalam kategori sedang (56,6%).

## 2. Fungsi Pengawasan

Hasil pengamatan peneliti tentang analisis persepsi responden terhadap variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.10**  
**Persepsi Responden Terhadap Variabel Fungsi Pengawasan**

Item	Jumlah					Jumlah	Persentase %					Jumlah (%)
	STS	TS	KS	S	SS		STS	TS	KS	S	SS	
P1	0	0	5	26	16	47	0	0	10,7	55,3	34	100
P2	0	1	4	29	13	47	0	2,1	8,5	61,7	27,7	100
P3	1	2	3	33	8	47	2,1	4,3	6,4	70,2	17	100
P4	0	0	6	26	15	47	0	0	12,8	55,3	31,9	100
P5	1	3	2	30	11	47	2,1	6,4	4,3	63,8	23,4	100
P6	0	0	6	26	15	47	0	0	12,8	55,3	31,9	100
P7	0	0	0	26	21	47	0	0	0	55,3	44,7	100

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020*

Pada tabel diatas variabel Fungsi Pengawasan adapun hasil kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Jumlah responden menjawab pernyataan 1 (Adanya penetapan standar dalam pengawasan APBD) sebanyak 5 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 26 responden menjawab Setuju (S) dan 16 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- b. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 (Standar yang ditetapkan disesuaikan dengan SOP) sebanyak 1 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 4 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 29 responden menjawab Setuju (S) dan 13 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- c. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 (Melakukan pengukuran progress pencapaian secara berulang-ulang baik intensitasnya harian, mingguan bahkan bulanan agar pengawasan

dapat bermutu) sebanyak 1 responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 2 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 3 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 33 responden menjawab Setuju (S) dan 8 responden menjawab Sangat Setuju (SS).

- d. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 (Membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan) sebanyak 6 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 26 responden menjawab Setuju (S) dan 15 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- e. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 5 (Hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan) sebanyak 1 responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 3 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 2 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 30 responden menjawab Setuju (S) dan 11 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- f. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 6 (Tindakan koreksi sangat dibutuhkan dalam pengawasan APBD) sebanyak 6 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 26 responden menjawab Setuju (S) dan 15 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- g. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 7 (Peran pengawasan memberikan tindakan koreksi untuk memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya) sebanyak 26 responden menjawab Setuju (S) dan 21 responden menjawab Sangat Setuju (SS).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 47 orang responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban responden terhadap jawaban variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.11**  
**Hasil analisis Deskriptif Variabel Fungsi Pengawasan**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL.X2	47	24	35	29.17	2.861
Valid N (listwise)	47				

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22*

Dapat dilihat dari tabel yang ada diatas, diperoleh hasil untuk variabel Fungsi Pengawasan dengan jumlah responden 47 orang, nilai rata-rata 29,17. Nilai minimum 24 dan nilai maksimum 35. Artinya indikator atau pernyataan mengenai Fungsi Pengawasan dapat dinilai baik. Analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel Fungsi Pengawasan didasarkan pada hasil jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat pada kuesioner yang dikirimkan kepada responden.

Untuk lebih mengetahui gambaran fungsi pengawasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba maka dibuat lima kategori dengan pedoman sebagai berikut Azwar (2012):

**Tabel 5.12**  
**Gambaran Fungsi Pengawasan**

	Frequency	Percent
Valid sangat rendah	8	17.0
rendah	5	10.6
sedang	25	53.2
tinggi	9	19.2
Total	47	100.0

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22*

Dari tabel diatas dapat diketahui ada 8 orang yang mempersepsi fungsi pengawasan sangat rendah (17%), ada 5 orang mempersepsi fungsi pengawasan rendah (10,6%) , ada 25 orang yang merpersepsi fungsi pengawasan sedang (25%) dan ada 9 orang yang mempersepsi fungsi pengawasan tinggi (19,2%). Dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan di Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba dalam kategori sedang (25%). Dalam hal ini bahwa kondisi Fungsi Pengawasan anggota dewan di Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba berjalan dengan semestinya atau yang telah ditentukan.

### **3. Kinerja keuangan daerah**

Hasil pengamatan peneliti tentang analisis persepsi responden terhadap variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.13**  
**Persepsi Responden Terhadap Variabel**  
**Kinerja keuangan daerah**

Item	Jumlah					Jumlah	Persentase %					Jumlah (%)
	STS	TS	KS	S	SS		STS	TS	KS	S	SS	
P1	0	0	6	25	16	47	0	0	12,8	53,2	34	100
P2	0	0	5	25	17	47	0	0	10,6	53,2	36,2	100
P3	0	3	2	27	15	47	0	6,4	4,3	57,4	31,9	100
P4	0	0	3	27	17	47	0	0	6,4	57,4	36,2	100
P5	1	1	4	28	13	47	2,1	2,1	8,5	59,6	27,7	100
P6	0	0	1	30	16	47	0	0	2,1	63,9	34	100
P7	0	1	1	24	21	47	0	2,1	2,1	51,1	44,7	100

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020*

Pada tabel diatas variabel fungsi pengawasan adapun hasil kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Jumlah responden menjawab pernyataan 1 (Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan) sebanyak 6 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 25 responden menjawab Setuju (S) dan 16 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- b. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 2 (Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif) sebanyak 5 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 25 responden menjawab Setuju (S) dan 17 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- c. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 3 (Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi kepada kepentingan publik) sebanyak 3 responden menjawab Tidak Setuju (STS), 2

- responden menjawab Kurang Setuju (KS), 27 responden menjawab Setuju (S) dan 15 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- d. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 4 (Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan) sebanyak 3 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 27 responden menjawab Setuju (S) dan 17 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- e. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 5 (Penerapan prinsip transparan, efisien, ekonomis serta efektif mendapat dampak sikap puas dari masyarakat) sebanyak 1 responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS), 1 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 4 responden menjawab Kurang Setuju (S) dan 28 responden menjawab Setuju (S) dan 13 responden menjawab Sangat Setuju (SS).
- f. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 6 (Anggaran dikelola secara merata (*equality*) dan penggunaan dana publik tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu) sebanyak 1 responden menjawab Kurang Setuju (KS), 30 responden menjawab Setuju (S) dan 16 responden menjawab Sangat Setuju (SS).

g. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 7 (Anggaran dikelola secara adil dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas) sebanyak 1 responden menjawab Tidak Setuju (TS), 1 responden menjawab Kurang Setuju (S) , 24 responden menjawab Setuju (S) dan 21 responden menjawab Sangat Setuju (SS).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 47 orang responden melalui penyebaran kuesioner, jawaban responden terhadap jawaban variabel Kinerja keuangan daerah yang terdiri dari 7 item pernyataan akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.14**  
**Hasil analisis Deskriptif Variabel Kinerja keuangan daerah**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL.Y	47	23	35	29.70	2.828
Valid N (listwise)	47				

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020*

Dapat dilihat dari tabel yang ada diatas, diperoleh hasil untuk variabel kinerja keuangan daerah dengan jumlah responden 47 orang, nilai rata-rata 29,70. Nilai minimum 23 dan nilai maksimum 35. Dapat diartikan, indikator atau pernyataan mengenai kinerja keuangan daerah menuju kearah maksimum. Maka dapat

disimpulkan indikator atau pernyataan mengenai kinerja keuangan daerah di nilai baik. Analisis deskripsi jawaban dari para responden tentang variabel kinerja keuangan daerah didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang ada pada kusioner yang dikirimkan kepada responden.

#### 5.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis uji F dan Uji T terpenuhi, Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data uji statistik, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan Uji autokorelasi.

##### 1. Uji Normalitas

**Tabel 5.15**  
**Hasil Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.54150302
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.060
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020.

Pada tabel hasil Uji SPSS diatas dapat dilihat bahwa Nilai P untuk uji Kolmogorov-Smirnov = 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independent. Model yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independent (tidak terjadi gejala Multikolinieritas). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala Multikolinieritas dengan menggunakan metode jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00.

**Tabel 5.16**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

NO	Vatiabel	Collinearity Statistics		keterangan
		Tolerance	VIF	
1	<b>Fungsi Anggaran</b>	.672	1.488	Bebas multikolonieritas
2	<b>Fungsi Pengawasan</b>	.672	1.488	Bebas multikolonieritas

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020.*

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan memberikan semua nilai VIF di bawah 10 atau nilai Tolerance di atas 0,1 Berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas pada data ini.

### 3. Uji Heterokedastisitas

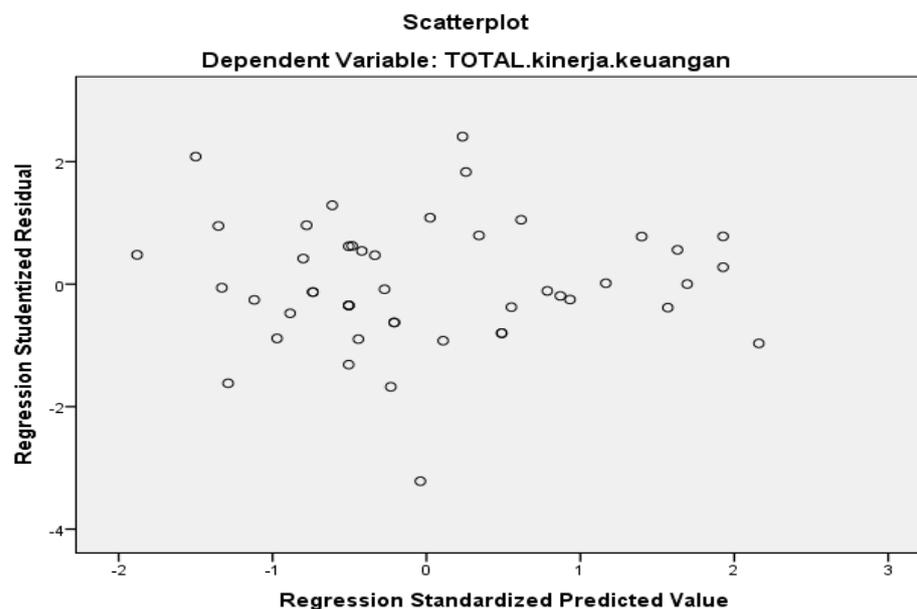
Tujuan dari uji ini untuk apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai signifikansi  $>0,05$  tidak terjadi heterokdesastiditas, apabila nilai sig.  $<0,05$  maka terjadi heterokdesastiditas.

**Tabel 5.17**  
**Hasil Uji Heterokdesastiditas**

<b>VARIABEL</b>	<b>Sig.</b>	<b>Ket</b>
<b>Fungsi Anggaran</b>	0.267	<b>Tidak terjadi heterokdesastiditas</b>
<b>Fungsi Pengawasan</b>	0.070	<b>tidak terjadi heterokdesastiditas</b>

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22,2020.*

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Output pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau signifikansi dari fungsi anggaran dan fungsi pengawassan  $>0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari masalah heteroskesdastisitas.

**Gambar 5.6 Grafik Scatterplot**

Dengan melihat output Scatterplot diatas dapat diketahui :

- a. Titik-titik data hasil penelitian yang telah dilakukan menyebar di atas dan juga menyebar dibawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik hasil penelitian tidak berkumpul atau terpusat hanya diatas atau dibawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data hasil penelitian yang terlihat pada grafik tidak membentuk suatu pola, dimana pola tersebut berbentuk gelombang melebar kemudian menyempit dan kemudian melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk suatu pola tertentu.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas untuk penelitian ini tidak terjadi sehingga untuk model regresi yang baik dan juga ideal dapat terpenuhi.

#### 4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Dasar untuk menentukan ada tidaknya korelasi yaitu jika  $d > d_U$  atau  $d < d_L$  atau  $d > 4 - d_L$ . Pada penelitian ini  $N=47$ ,  $K=2$ ,  $d_L=1,4435$ ,  $d_U=1,6204$  dengan tingkat sig yaitu 5% atau 0,05.

**Tabel 5.18**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.688 <sup>a</sup>	.473	.449	2.099	2.381

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22

Pada tabel diatas dapat dilihat menunjukkan bahwa diperoleh nilai  $d = 2.370$  dan nilai  $d_U$  pada tabel durbin Watson untuk  $k=2$ ,  $n=47$  dan  $\alpha = 0,05 = 1,6204$ , maka nilai  $d > d_U$  ( $2.381 > 1,6204$ ) artinya model bebas dari gejala autokorelasi.

#### 4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

##### A. Hasil Uji Regresi Berganda

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan asumsi persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Dimana :

Y : Kinerja Keuangan Daerah

X1 : Fungsi Anggaran

X2 : Fungsi Pengawasan

$\beta$  : Koefisien Regresi

a : Konstanta

e : Error

Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 22 maka nilai koefisien regresi masing-masing variabel meliputi Kompetensi, lingkungan kerja dan motivasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.19**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.989	3.472		2.301	.026
	TOTAL.X 1	.288	.122	.314	2.349	.023
	TOTAL.X 2	.453	.132	.458	3.432	.001

a. Dependent Variable: TOTAL.Pengelolaan.Anggaran

Berdasarkan hasil analisa data menggunakan SPSS Ver. 22 diperoleh dalam perhitungan regresi diatas, maka persamaan regresinya menjadi :

$$Y = 7.969 + 0,288 X_1 + 0,453 X_2$$

Persamaan linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi fungsi anggaran ( $X_1$ ) sebesar 0,288 berarti ada pengaruh positif fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebesar 0,288 sehingga skor fungsi anggaran naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,288.
2. Nilai koefisien regresi fungsi pengawasan sebesar 0,453 berarti ada pengaruh positif fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebesar 0,453 sehingga skor fungsi pengawasan naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,453

#### B. Hasil Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 5.20**  
**Hasil Uji F (Uji Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173.932	2	86.966	19.735	.000 <sup>b</sup>
	Residual	193.898	44	4.407		
	Total	367.830	46			

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22,2020*

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Uji (F) dengan Nilai probabilitas ( $p$ ) = 0,000 < 0,05 serta  $F_{hitung}$  19,735 >  $F_{tabel}$  3,21 menunjukkan bahwa variabel Fungsi Anggaran dan Fungsi

Pengawasan mempunyai pengaruh simultan yang signifikan terhadap variabel Kinerja keuangan daerah.

### C. Hasil Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 5.21**  
**Hasil Uji T (Uji Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.301	.026
	TOTAL.X1	2.349	.023
	TOTAL.X2	3.432	.001

*Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22,2020*

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Fungsi Anggaran memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,349 > 2.01537$ ) dan nilai sig ( $0,023 < 0,05$ ), menunjukkan bahwa variabel Fungsi Anggaran mempunyai pengaruh terhadap variabel Kinerja keuangan daerah dan Variabel Fungsi Pengawasan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,432 > 2.01537$ ) dan nilai sig ( $0,001 < 0,05$ ). (dapat disimpulkan bahwa variabel Fungsi pengawasan mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja keuangan daerah.

### D. Uji Beta ( $\beta$ )

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi.

**Tabel 5.22**  
**Hasil Uji Beta ( $\beta$ )**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	7.989	3.472	
	TOTAL.X1	.288	.122	.314
	TOTAL.X2	.453	.132	.458

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22,2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Standardized Coefficients* variabel Fungsi anggaran yaitu 0,314 dan fungsi pengawasan yaitu 0,458 maka dapat disimpulkan variabel dengan nilai *Standardized Coefficients* tertinggi yang memiliki pengaruh paling dominan yaitu fungsi pengawasan

#### E. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) untuk melihat bseberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2013).

**Tabel 5.23**  
**Hasil Uji Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.688 <sup>a</sup>	.473	.449	2.099

Sumber: Data Primer diolah pada SPSS 22

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,473 hal ini berarti 47,3% yang menunjukkan bahwa Kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sisanya sebesar 52,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### **5.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **5.3.1 Pengaruh Fungsi Anggaran DPRD Dalam Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba**

Penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 38 anggota DPRD dan 9 aparatur sipil negara pada bagian keuangan di lingkup Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba, dimana terdiri dari 7 item pernyataan untuk variabel bebas (Fungsi anggaran) dan 7 item pernyataan untuk variabel terikat (Kinerja Keuangan Daerah).

Untuk melihat pengaruh fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah maka dilakukan Uji T (Parsial) yaitu didapatkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,349 > 2.01537$ ) dan nilai sig ( $0,023 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Fungsi anggaran dengan variabel kinerja keuangan daerah. Fungsi anggaran merupakan salah satu hak yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah (Yuliastati,2009).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2012) hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang

signifikan positif antara pelaksanaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,982 > 2,03011$  dengan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  ( $H_1$  diterima).

Berdasarkan hasil penelitian Siregar (2019) diperoleh bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan pentingnya kualitas anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik berupa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Faktor terpenting dan paling menentukan adalah evaluasi anggaran yang ditunjukkan dengan loading faktor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan secara optimal akan menghindari terjadi penyimpangan dan kecurangan sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi dan rendahnya kualitas anggaran akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya kinerja keuangan, dengan kata lain apabila kualitas anggaran tinggi maka kinerja keuangan akan meningkat sebaliknya apabila kualitas anggaran rendah maka kinerja keuangan juga rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Robinson (2009) dalam Made dan Wulandari (2019) yang menyatakan bahwa tujuan fungsi anggaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengeluaran publik dengan mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Lubis (2009) berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel fungsi anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji hipotesis bahwa fungsi anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **5.3.2 Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba**

Penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 38 anggota DPRD dan 9 aparatur sipil negara pada bagian keuangan di lingkup Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba, dimana terdiri dari 7 item pernyataan untuk variabel bebas (Fungsi pengawasan) dan 7 item pernyataan untuk variabel terikat (kinerja keuangan daerah).

Untuk melihat pengaruh fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah maka dilakukan Uji T (Parsial) yaitu didapatkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,432 > 2.01537$ ) dan nilai sig ( $0,001 < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Fungsi pengawasan dengan variabel kinerja keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba memiliki pengaruh dalam kinerja keuangan daerah karena dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung maka anggota DPRD

mendapatkan informasi yang akurat. Tujuan dari penerapan fungsi pengawasan sebagai salah satu dari fungsi DPRD tersebut untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Jika suatu proses pelaksanaan dilakukan tanpa adanya pengawasan maka bisa saja terjadi proses penyimpangan atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi terutama dalam hal keuangan. Pengawasan anggota dewan pada tahap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yaitu dilakukan pada saat kerja dengan unsur pemerintahan daerah, yang nantinya akan dirumuskan menjadi kebijakan daerah. Anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, tempat dimana program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan, dengan tujuan untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan rencana semula dan mencapai sasaran yang diinginkan/diharapkan atau tidak.

Menurut Kasenda,dkk (2020) pengawasan DPRD merupakan fungsi terakhir yang dimiliki DPRD, hal ini karena obyek-obyek yang diawasi DPRD merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang dihasilkan fungsi legislasinya maupun fungsi anggaran, oleh karena itu keseluruhan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ada beberapa

tahapan mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD yaitu tahapan perencanaan APBD, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi.

Menurut Kamilah (2014) pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menilai dan membuat rancangan peraturan daerah dan memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam pengawasan ini DPRD memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan mulai dari serap aspirasi masyarakat hingga APBD itu selesai dibuat.

Menurut Tjanne,dkk (2018) Ada tiga tahapan dalam melakukan pengawasan terkait APBD yaitu:

- a. pengawasan awal yang merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan awal yang dilakukan DPRD yaitu menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas APBD, melakukan klasifikasi dan ratifikasi dan mengambil keputusan dan pengesahan.
- b. Pengesahan proses merupakan pengesahan yang dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung dan untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini pengawasan dilakukan melalui pengawasan melalui komisi dan melakukan pengawasan melalui hak-hak yang dimiliki oleh DPRD.

- c. Pengawasan akhir yaitu pada tahap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan APBD, pemimpin daerah dalam hal ini Bupati melakukan kegiatan yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) kepada DPRD yang dilakukan dalam sidang paripurna DPRD.

Menurut Anisatul,dkk (2016) pengawasan internal penting dilakukan untuk mencegah terjadinya beberapa penyimpangan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas–tugas organisasi. Semakin tinggi pengawasan internal maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi. Made,dkk (2015) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

### **5.3.3 Pengaruh Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba**

Hasil penelitian melalui uji F (uji simultan) nilai nilai  $F_{hitung}$   $19,735 > F_{tabel}$   $3,21$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel fungsi anggaran dan fungsi pengawasan mempunyai pengaruh simultan atau pengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah.

Kualitas fungsi anggaran yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan daerah begitupun dengan penerapan fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Bulukumba dimana bertujuan untuk melihat secara langsung apakah ada penyimpangan dari yang telah

ditentukan (sesuai) atau tidak. Ketika ditemukan dilapangan ada masalah maka akan mempengaruhi saran dan masukan anggota DPRD pada saat melakukan penganggaran. Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan suoaaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai.

#### **5.3.4 Variabel Yang Dominan Berpengaruh Terhadap Kinerja keuangan daerah Pada Sekretariat DPRD Kab.Bulukumba**

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi Fungsi Anggaran 0,314 dan Fungsi Pengawasan 0,458 maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba adalah variabel Fungsi Pengawasan. Fungsi Pengawasan sebagai variabel yang dominan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan daerah karena pada tahap disini lah mulai dari awal penyusunan APBD sampai pada tahap pelaksanaan terus diawasi dengan tujuan dengan adanya pengawasan dapat meminimalisir jika terjadi kesalahan atau penyimpangan pada APBD yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Djiloy (2016) Jika pengawasan dijalankan dengan baik maka akan mendorong terwujudnya pertanggunghawan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang senakin baik dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN serta *good governance*, pengawasan intern

harus diarahkan pada terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang bercirikan pada penerapan *good governance* secara penuh. Pengawasan penting dilakukan dengan maksud untuk menguji dan mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dimaksudkan untuk membantu mencapai kinerja secara selektif.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh fungsi anggaran terhadap Kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
- b. Terdapat pengaruh fungsi pengawasan terhadap Kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.
- c. Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba.

#### **6.2 Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran-saran yaitu :

- a. Kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba, untuk meningkatkan kualitas fungsi anggaran dengan mengikuti tahapan-tahapan atau harus terstruktur dalam penyusunan APBD, agar legislatif mampu memberikan argument yang rasional atas pertanyaan atau bantahan terkait APBD.
- b. Kepada Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba, agar lebih memperkuat atau meningkatkan fungsi pengawasannya agar mendapatkan informasi yang akurat, yang dimulai dari pelaksanaan sampai evaluasi pelaksanaan APBD yang telah

ditetapkan, agar nantinya ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan APBD yang telah disepakati.

### **6.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai usaha untuk membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna. Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini hanya membahas dua dari tiga fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Bulukumba.Sedangkan secara obyektif masih banyak faktor lain yang mendukung agar kinerja keuangan daerah dapat tercapai sesuai yang diharapkan atau disepakati.
- b. Walaupun penulis sebelum melakukan penelitian telah melakukan serangkaian uji coba untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, namun demikian pengumpulan melalui angket ini masih ada kelemahan-kelemahan seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab secara asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap.
- c. Sebagai pribadi penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga yang terbatas. Hal ini

merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggasta, E. G., & Murtini, H. (2014). *Determination Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi*. Accounting Analysis Journal, Vol. 3 No. 4.
- Anggraeni, Rafika. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Anisatul, dkk .2016. *Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar)*. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. ISSN 2460-0784.
- Ardila, Lisa, 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Ambiguitas Peran Dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*.Jurnal. S-1 UNP.
- asri, Ramlah. (2013). *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4, pp 202-212.
- Azwar. (2012). *Metode Penelitian*: Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. *The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management*. Journal of Health-care Management.
- Djiloly, Novita Lerly.*Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi*.Jurnal Katalogis.Vol4(6).pp.70-82.
- Espinoza.2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Laporan Penelitian. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fatikhah R, Dewi Noor. 2013. *Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 1, No 2, Hal. 1-15.

- Fauzan , Muhammad.2012. *Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang*.repository.UNP.ac.id.
- Febrina Astria Verasvera.2016. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat*.
- Fifit & Nadirsyah. 2016. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 1 No. 2.
- Fitrianingrum, Eva Dilla. 2015. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu*. FISIP UNMUL : Samarinda.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim.2004. *Menejemen Keuangan Daerah*.Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Haslindah.2016. *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo)*.Skripsi.UIN Makassar.

- Hidayat dan Ghozali, 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).jurnal ilmiah FEB Universitas Brawijaya.
- Juliawati, Ebit, Darwanis, & Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. vol. 1 no. 1. hal. 15-29.
- Kamilah, A.,2014.*Pengembangan Modul Biologi Berbasis Islam-Sains Sebagai Bahan Ajar Mandiri Pada Sub Materi Pokok Komponen Ekosistem Untuk Siswa Kelas X Madrasah Aliyah (MA)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kasenda,dkk.2020. *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Kota Manado*. Program Studi Megister Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Pascasarjana Universitas Sam Ratulagi.Vol.1(1).
- Latuheru, Belianus Patria. (2005). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.7, No.2, Nopember 2005, hal:117-130.
- Lubis, Hijrani Putri, 2009. *Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara.
- Made dan Wulandari .2019. *Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang*. JRMA, Volume 7. ISSN. 2337-5663.
- Made, dkk. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*.e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)
- Mahmudi. 2011.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahsun, Mohamad, 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munandar.,2010.*Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*.BPFE.Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ratminto dan Atik. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salbiah dan Ridha Rizky.2012. *Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonom, Vol 15, No 2.
- Satriadi.2016.*Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Binaan Tanjung Pinang*. 2302-1590.Jurnal Economica.Vol 4. No.2. Padang.
- Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi manajerial edisi revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Siregar, Mahmuddin.2019. *Hasil Penelitian Ini Mengindikasikan Bahwa Tinggi Dan Rendahnya Kualitas Anggaran Akan Mempengaruhi Tinggi Dan Rendahnya Kinerja Keuangan*. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen. Vol 2, No. 2, ISSN 2623-2634.
- Siswandi.2009.*Aplikasi Manajemen Perusahaan*.Edisi Kedua. Jakarta:Mitra.
- Subiantoro, Yohanes.2011. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Mojokerto*. Program Studi/Jurusan Sistem Informasi, STIKOM Surabaya.
- Sudjana, Nana & Ibrahim. (2012). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Saefullah dan Trikusniawan.2005.*Pengantar Manajemen*. Jakarta. Prenada Media Jakarta.
- Sundari, 2015.*Pengaruh Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi Dan Locus Of Control Terhadap Hubungan Partisipasi*

*Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja 115 Perangkat Daerah Kota Sawahlunto).*Jom FEKON Vol. 2 No.2

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bulukumba**

Jalan Sultan Hasanuddin No.43 Kec.Ujung Bulu

Dengan Hormat ,

Sebagai syarat menyelesaikan studi akhir , saya melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kinerja keuangan daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba”**. Dengan ini saya mohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini.

Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, lakukan dan alami di tempat kerja. Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua jawaban dan informasi yang didapatkan ini akan menjadi bahan penelitian secara akademis dan jawaban ini akan dirahasiakan. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang sangat bernilai bagi saya.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, dan peneliti mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu.

### A. Identitas Responden

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon untuk mengisi data dan berikan tanda centang (✓) untuk pilihan jawaban anda, sebagai berikut :

Nama :  
Jenis kelamin :  Pria  Wanita  
Usia :  
Pendidikan Terakhir :  Sekolah Menengah Atas (SMA)  
 Diploma  
 Sarjana (S1)  
 Megister (S2)

Masa kerja :

### B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah setiap pertanyaan ini sesuai dengan pendapat anda.
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pertanyaan dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda.

**Keterangan : SS** = Sangat Setuju (5)

**S** = Setuju (4)

**KS** = Kurang Setuju (3)

**TS** = Tidak Setuju (2)

**STS** = Sangat Tidak Setuju (1)

### C. Pernyataan Penelitian

#### 1. Pernyataan (Fungsi Anggaran)

No	Pernyataan Fungsi Anggaran	Tanggapan Responden				
		STS	TS	KS	SS	SS
		1	2	3	4	5
<b>Standar Anggaran</b>						
1	Pada penyusunan anggaran mengikuti acuan atau pedoman dalam penetapan suatu anggaran.					
2	penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD. Agar legislatif mampu memberikan argumen yang rasional atas pertanyaan atau bantahan terkait APBD					
3	Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah					
<b>Sasaran Anggaran</b>						
4	Penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan mencapai tujuan secara efektif					
5	Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan secara efektif yang telah disepakati					
<b>Target Anggaran</b>						
6	Anggaran selalu terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai					
7	Target yang dimasukkan dalam anggaran sangat mudah dijangkau atau tercapai					

## 2. Pernyataan Fungsi Pengawasan

No	Pernyataan Fungsi Pengawasan	Tanggapan Responden				
		ST S	TVS	KS	SS	SS
		1	2	3	4	5
<b>Standars</b>						
1	Adanya penetapan standar dalam penetapan APBD					
2	Standar yang ditetapkan disesuaikan dengan SOP					
<b>Measurement</b>						
3	Melakukan pengukuran progress pencapaian secara berulang-ulang baik intensitasnya harian, mingguan bahkan bulanan agar pengawasan dapat bermutu					
<b>Compare</b>						
4	Membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan					
5	Hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan					
<b>Action</b>						
6	Tindakan koreksi sangat dibutuhkan dalam pengawasan APBD					
7	Peran pengawasan memberikan tindakan koreksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya					

## 3. Pernyataan Kinerja keuangan daerah

No	Pernyataan Kinerja Keuangan Daerah	Tanggapan Responden				
		ST S	TS	KS	SS	SS
		1	2	3	4	5
<b>Efektivitas</b>						
1	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan					
<b>Produktivitas</b>						
2	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif					

<b>Efisiensi</b>					
3	Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep <i>value for money</i> yang berorientasi kepada kepentingan publik				
4	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan				
<b>Kepuasan</b>					
4	Penerapan prinsip transparan, efisien, ekonomis serta efektif mendapat dampak sikap puas dari masyarakat				
<b>keadilan</b>					
6	Anggaran dikelola secara merata ( <i>equality</i> ) dan penggunaan dana public tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu				
7	Anggaran dikelola secara adil dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas				

## LAMPIRAN

### • TABULASI DATA

1	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total X1
2	NA	Perempuan	48 tahun	SMA	10 tahun	3	4	4	3	4	5	4	27
3	HA	Perempuan	40 tahun	Sarjana (S1)	9 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
4	AS	Perempuan	44 tahun	Sarjana (S1)	10 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
5	IS	laki-laki	50 tahun	Megister (S2)	27 tahun	4	5	4	4	3	3	5	28
6	AN	Perempuan	34 tahun	Sarjana (S1)	11 tahun	4	5	5	4	5	5	4	32
7	DA	Perempuan	32 tahun	Diploma (D3)	7 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
8	FH	laki-laki	49 tahun	Megister (S2)	20 tahun	3	4	4	3	3	4	5	26
9	ML	laki-laki	63 tahun	SMA	1 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
10	Y	laki-laki	40 tahun	SMA	1 tahun	3	4	4	4	4	4	3	26
11	FT	Perempuan	40 tahun	Megister (S2)	7 tahun	5	5	5	5	5	5	5	35
12	AS	laki-laki	38 tahun	Megister (S2)	1 tahun	4	4	4	4	5	5	4	30
13	AH	laki-laki	37 tahun	Diploma (D3)	1 tahun	4	4	4	3	4	4	4	27
14	AJL	laki-laki	31 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	5	4	4	4	4	5	4	30
15	AK	laki-laki	51 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	3	4	4	3	3	4	4	25
16	AT	laki-laki	58 tahun	Sarjana (S1)	22 tahun	5	5	4	4	4	4	4	30
17	SU	laki-laki	53 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	5	5	5	5	5	5	4	34
18	RI	laki-laki	39 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	5	5	5	5	5	4	4	33
19	PA	laki-laki	56 tahun	Sarjana (S1)	7 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
20	JT	laki-laki	31 tahun	SMA	1 tahun	5	5	5	5	1	5	5	31
21	ASW	Perempuan	31 tahun	Megister (S2)	1 tahun	5	5	5	5	5	5	5	35
22	ZS	laki-laki	50 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	5	5	5	5	5	5	5	35
23	SHB	laki-laki	39 tahun	SMA	1 tahun	5	5	5	5	5	3	5	33
24	AMA	laki-laki	53 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	5	5	5	5	3	4	4	31
25	KI	laki-laki	23 tahun	SMA	1 tahun	5	5	5	5	5	4	4	33
26	AA	laki-laki	33 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	4	4	5	4	4	4	5	30
27	MJ	laki-laki	43 tahun	Sarjana (S1)	7 tahun	4	5	5	5	4	5	5	33
28	AEH	Perempuan	55 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
29	AS	laki-laki	25 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	3	4	4	5	3	4	4	27
30	PA	laki-laki	58 tahun	Megister (S2)	1 tahun	4	4	4	5	4	4	4	29
31	AM	laki-laki	61 tahun	Megister (S2)	1 tahun	4	5	4	4	3	4	4	28
32	SA	laki-laki	53 tahun	Megister (S2)	6 tahun	4	5	5	4	4	4	4	30
33	SP	laki-laki	47 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	4	4	5	4	3	4	5	29

N	U	P	U	H	S	I	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Total Y
3	4	4	3	4	3	4	25	3	4	4	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	5	4	4	4	5	30	4	5	2	3	3	4	2	23
4	4	1	4	3	4	5	25	4	5	5	5	4	4	4	31
4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28
4	3	4	3	4	3	4	25	3	4	5	4	5	5	5	31
4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	3	4	4	26
4	5	4	4	4	3	4	28	3	4	5	4	4	4	5	29
5	5	5	5	4	5	5	34	5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	4	4	4	4	5	30	4	5	5	5	5	5	5	34
3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	3	4	4	27
4	4	4	4	4	5	4	29	5	4	5	4	4	5	5	32
3	3	4	3	4	3	4	24	3	3	5	5	4	4	3	27
5	5	4	4	4	5	4	31	5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	5	2	5	5	29	5	5	5	5	4	4	5	33
5	4	4	5	4	5	4	31	5	4	4	4	5	5	4	31
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	5	5	5	32
5	4	4	5	5	5	5	33	5	5	5	5	4	4	5	33
5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	4	5	5	5	5	32
5	2	4	5	2	5	5	28	5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	5	5	5	5	32	5	5	4	5	4	4	4	31
5	5	4	5	5	5	4	33	5	4	5	5	5	5	5	34
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	4	5	34	4	5	5	5	5	5	5	34
3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	5	4	3	5	29	3	5	4	5	4	5	4	30
4	4	4	5	5	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	5	4	3	4	4	28	4	4	5	5	3	4	5	30
5	4	5	4	4	4	5	31	4	5	4	4	4	4	4	29
4	5	4	4	5	4	5	31	4	5	5	4	4	5	5	32

NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Total X1	
34	MB	laki-laki	57 tahun	SMA	12 tahun	5	5	4	5	4	5	5	33
35	ARA	Perempuan	62 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	4	5	5	3	4	4	4	29
36	APH	laki-laki	57 tahun	Sarjana (S1)	11 tahun	4	5	5	4	5	5	5	33
37	UH	laki-laki	54 tahun	Sarjana (S1)	11 tahun	3	4	5	4	4	4	4	28
38	SA	laki-laki	45 tahun	Diploma (D3)	1 tahun	4	4	4	4	4	5	5	30
39	MT	laki-laki	47 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	4	4	5	3	3	4	4	27
40	SY	laki-laki	63 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	5	5	5	5	4	4	4	32
41	SA	Perempuan	71 tahun	Sarjana (S1)	6 tahun	5	5	5	5	5	5	5	35
42	NNI	Perempuan	41 tahun	SMA	1 tahun	4	5	4	4	5	4	4	30
43	ASY	Perempuan	67 tahun	Megister (S2)	6 tahun	4	4	4	4	4	4	4	28
44	ALH	Perempuan	40 tahun	Sarjana (S1)	10 tahun	5	5	5	4	3	5	5	32
45	AZP	laki-laki	55 tahun	Sarjana (S1)	11 tahun	4	4	4	4	2	4	2	24
46	WA	laki-laki	41 tahun	Megister (S2)	22 tahun	4	2	4	4	2	4	3	23
47	KM	laki-laki	34 tahun	Sarjana (S1)	1 tahun	4	3	4	4	3	4	3	25
48	MAM	laki-laki	43 tahun	Sarjana (S1)	13 tahun	4	3	4	4	4	4	3	26

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total X2	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Total Y	
33	4	4	2	5	1	5	5	26	4	4	2	5	1	5	5	26
29	4	3	4	3	2	4	4	24	4	3	4	3	2	4	4	24
33	5	5	5	4	4	4	5	32	5	5	5	4	4	4	5	32
28	3	3	4	4	4	3	5	26	3	3	4	4	4	3	5	26
30	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	3	4	4	4	4	27
27	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	3	4	4	4	27
32	4	4	4	5	4	5	4	30	4	4	4	5	4	5	4	30
35	5	5	4	5	5	5	5	34	5	5	4	5	5	5	5	34
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	3	4	5	4	5	29	4	4	3	4	5	4	5	29
32	4	4	4	4	5	5	5	31	4	4	4	4	5	5	5	31
24	4	4	2	4	4	4	5	27	4	4	2	4	4	4	5	27
23	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30
25	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30
26	5	5	4	4	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	4	30

- **UJI VALIDITAS ITEM**( $r$  table = 0.2876)

(Correlation is significant at the 0.05 level)

### 1. Validitas → Fungsi Anggaran

			penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD. Agar legislatif mampu memberikan argumen yang rasional atas pertanyaan atau bantahan terkait APBD	Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah	Penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan mencapai tujuan secara efektif	Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan secara efektif yang telah disepakati	Anggaran selalu terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai	Target yang dimasukkan dalam anggaran sangat mudah dijangkau atau tercapai	TOTAL.X1
Pada penyusunan anggaran mengikuti acuan atau pedoman dalam penetapan suatu anggaran.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .523** 47	.523** 1 47	.466** .001 47	.637** .000 47	.255 .083 47	.281 .056 47	.310* .034 47	.728** .000 47
penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD. Agar legislatif mampu memberikan argumen yang rasional atas pertanyaan atau bantahan terkait APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.523** .000 47	1 .000 47	.572** .000 47	.424** .003 47	.383** .008 47	.239 .106 47	.545** .000 47	.787** .000 47
Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.466** .001 47	.572** .000 47	1 .000 47	.400** .005 47	.248 .093 47	.256 .083 47	.444** .002 47	.686** .000 47
Penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan mencapai tujuan secara efektif	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.637** .000 47	.424** .003 47	.400** .005 47	1 .000 47	.255 .083 47	.218 .140 47	.261 .077 47	.673** .000 47
Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan secara efektif yang telah disepakati	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.255 .083 47	.383** .008 47	.248 .093 47	.255 .083 47	1 .083 47	.237 .109 47	.243 .100 47	.623** .000 47
Anggaran selalu terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.281 .056 47	.239 .106 47	.256 .083 47	.218 .140 47	.237 .109 47	1 .077 47	.326* .025 47	.516** .000 47
Target yang dimasukkan dalam anggaran sangat mudah dijangkau atau tercapai	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.310* .034 47	.545** .000 47	.444** .002 47	.261 .077 47	.243 .100 47	.326* .025 47	1 .077 47	.682** .000 47
TOTAL.X1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.728** .000 47	.787** .000 47	.686** .000 47	.673** .000 47	.623** .000 47	.516** .000 47	.662** .000 47	1 47

## 2. Validitas → Fungsi Pengawasan

		Adanya penetapan standar dalam penetapan APBD	Standar yang ditetapkan disesuaikan dengan SOP	Melakukan pengukuran progress pencapaian secara berulang-ulang baik intensitasnya harian, mingguan bahkan bulanan agar pengawasan dapat bermutu	Membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan	Hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Tindakan koreksi sangat dibutuhkan dalam pengawasan APBD	Peran pengawasan memberikan tindakan koreksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya	TOTAL_X2
Adanya penetapan standar dalam penetapan APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .000 47	.488** .000 47	.285 .052 47	.525** .000 47	.160 .283 47	.525** .000 47	.279 .057 47	.746** .000 47
Standar yang ditetapkan disesuaikan dengan SOP	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.488** .000 47	1 .000 47	.224 .129 47	.289 .049 47	.461** .001 47	.238 .108 47	.057 .702 47	.667** .000 47
Melakukan pengukuran progress pencapaian secara berulang-ulang baik intensitasnya harian, mingguan bahkan bulanan agar pengawasan dapat bermutu	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.285 .052 47	.224 .129 47	1 .000 47	.103 .492 47	.325* .026 47	.060 .691 47	-.006 .969 47	.520** .000 47
Membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.525** .000 47	.289* .049 47	.103 .492 47	1 .000 47	.117 .433 47	.637** .000 47	.466** .001 47	.698** .000 47
Hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.160 .283 47	.461** .001 47	.325* .026 47	.117 .433 47	1 .000 47	.000 1.000 47	.050 .737 47	.566** .000 47
Tindakan koreksi sangat dibutuhkan dalam pengawasan APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.525** .000 47	.238 .108 47	.060 .691 47	.637** .000 47	.000 1.000 47	1 .000 47	.266 .071 47	.604** .000 47
Peran pengawasan memberikan tindakan koreksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.279 .057 47	.057 .702 47	-.006 .969 47	.466** .001 47	.050 .737 47	.266 .071 47	1 .000 47	.430** .003 47
TOTAL_X2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.746** .000 47	.667** .000 47	.520** .000 47	.698** .000 47	.566** .000 47	.604** .000 47	.430** .003 47	1 .000 47

### 3. Validitas → Kinerja keuangan daerah

		Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif	Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	Penerapan prinsip transparan, efisien, ekonomis serta efektif mendapat dampak sikap puas dari masyarakat	Anggaran dikelola secara merata (equality) dan penggunaan dana public tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu	Anggaran dikelola secara adil dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas	TOTAL Pengelolaan Anggaran
Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .008 47	.384** .008 47	.107 .476 47	.114 .446 47	.171 .251 47	.244 .098 47	.214 .149 47	.514** .000 47
Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.384** .008 47	1 .008 47	.183 .218 47	.256 .083 47	.210 .156 47	.208 .160 47	.074 .622 47	.534** .000 47
Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.107 .476 47	.183 .218 47	1 .009 47	.376** .009 47	.396** .006 47	.204 .169 47	.360 .013 47	.652** .000 47
Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.114 .446 47	.256 .083 47	.376** .009 47	1 .009 47	.268 .068 47	.398** .006 47	.382** .008 47	.631** .000 47
Penerapan prinsip transparan, efisien, ekonomis serta efektif mendapat dampak sikap puas dari masyarakat	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.171 .251 47	.210 .156 47	.396** .006 47	.268 .068 47	1 .015 47	.353 <sup>†</sup> .015 47	.314 <sup>†</sup> .032 47	.672** .000 47
Anggaran dikelola secara merata (equality) dan penggunaan dana public tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.244 .098 47	.208 .160 47	.204 .169 47	.398** .006 47	.353 <sup>†</sup> .015 47	1 .004 47	.409** .004 47	.619** .000 47
Anggaran dikelola secara adil dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.214 .149 47	.074 .622 47	.360 <sup>†</sup> .013 47	.382** .008 47	.314 <sup>†</sup> .032 47	.409** .004 47	1 .004 47	.637** .000 47
TOTAL Pengelolaan Anggaran	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.514** .000 47	.534** .000 47	.652** .000 47	.631** .000 47	.672** .000 47	.619** .000 47	.637** .000 47	1 47

- **UJI RELIABILITAS ITEM**

1. **Reliabilitas → Fungsi Anggaran ( $\alpha > 0.50$ )**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.782	7

2. **Reliabilitas → Fungsi Pengawasan ( $\alpha > 0.50$ )**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	7

3. **Reliabilitas → Kinerja keuangan daerah ( $\alpha > 0.50$ )**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	7

- **UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

- **Deskriptif Responden**

**jenis kelamin**

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	laki-laki	34	72.3	72.3	72.3
	Perempuan	13	27.7	27.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**umur**

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	23 tahun	1	2.1	2.1	2.1
	25 tahun	1	2.1	2.1	4.3
	31 tahun	3	6.4	6.4	10.6
	32 tahun	1	2.1	2.1	12.8
	33 tahun	1	2.1	2.1	14.9
	34 tahun	2	4.3	4.3	19.1
	37 tahun	1	2.1	2.1	21.3
	38 tahun	1	2.1	2.1	23.4
	39 tahun	2	4.3	4.3	27.7
	40 tahun	4	8.5	8.5	36.2
	41 tahun	2	4.3	4.3	40.4
	43 tahun	2	4.3	4.3	44.7
	44 tahun	1	2.1	2.1	46.8
	45 tahun	1	2.1	2.1	48.9
	47 tahun	2	4.3	4.3	53.2
	48 tahun	1	2.1	2.1	55.3
	49 tahun	1	2.1	2.1	57.4
	50 tahun	2	4.3	4.3	61.7
	51 tahun	1	2.1	2.1	63.8
	53 tahun	3	6.4	6.4	70.2
	54 tahun	1	2.1	2.1	72.3
	55 tahun	2	4.3	4.3	76.6
	56 tahun	1	2.1	2.1	78.7
	57 tahun	2	4.3	4.3	83.0
	58 tahun	2	4.3	4.3	87.2
	61 tahun	1	2.1	2.1	89.4
	62 tahun	1	2.1	2.1	91.5
63 tahun	2	4.3	4.3	95.7	
67 tahun	1	2.1	2.1	97.9	
71 tahun	1	2.1	2.1	100.0	
Total		47	100.0	100.0	

**pendidikan terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma (D3)	3	6.4	6.4	6.4
	Megister (S2)	10	21.3	21.3	27.7
	Sarjana (S1)	26	55.3	55.3	83.0
	SMA	8	17.0	17.0	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**masa kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 tahun	1	2.1	2.1	2.1
	6 tahun	1	2.1	2.1	4.3
	1 tahun	19	40.4	40.4	44.7
	10 tahun	3	6.4	6.4	51.1
	11 tahun	4	8.5	8.5	59.6
	12 tahun	1	2.1	2.1	61.7
	13 tahun	1	2.1	2.1	63.8
	20 tahun	1	2.1	2.1	66.0
	22 tahun	2	4.3	4.3	70.2
	27 tahun	1	2.1	2.1	72.3
	6 tahun	8	17.0	17.0	89.4
	7 tahun	4	8.5	8.5	97.9
	9 tahun	1	2.1	2.1	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

- **Deskriptif Item Pernyataan**

1. Hasil Uji Deskriptif → Fungsi Anggaran

**Pada penyusunan anggaran mengikuti acuan atau pedoman dalam penetapan suatu anggaran.**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD. Agar legislatif mampu memberikan argumen yang rasional atas pertanyaan atau bantahan terkait APBD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
kurang setuju	2	4.3	4.3	6.4
setuju	22	46.8	46.8	53.2
sangat setuju	22	46.8	46.8	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	26	55.3	55.3	55.3
sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan mencapai tujuan secara efektif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
	setuju	26	55.3	55.3	68.1
	sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan secara efektif yang telah disepakati**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
	tidak setuju	2	4.3	4.3	6.4
	kurang setuju	10	21.3	21.3	27.7
	setuju	22	46.8	46.8	74.5
	sangat setuju	12	25.5	25.5	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Anggaran selalu terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	2	4.3	4.3	4.3
	setuju	30	63.8	63.8	68.1
	sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Target yang dimasukkan dalam anggaran sangat mudah dijangkau atau tercapai**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
	kurang setuju	4	8.5	8.5	10.6
	setuju	27	57.4	57.4	68.1
	sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

## 2. Hasil Uji Deskriptif → Fungsi Pengawasan

### Adanya penetapan standar dalam penetapan APBD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	5	10.6	10.6	10.6
setuju	26	55.3	55.3	66.0
sangat setuju	16	34.0	34.0	100.0
Total	47	100.0	100.0	

### Standar yang ditetapkan disesuaikan dengan SOP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
kurang setuju	4	8.5	8.5	10.6
setuju	29	61.7	61.7	72.3
sangat setuju	13	27.7	27.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

### Melakukan pengukuran progress pencapaian secara berulang-ulang baik intensitasnya harian, mingguan bahkan bulanan agar pengawasan dapat bermutu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
tidak setuju	2	4.3	4.3	6.4
kurang setuju	3	6.4	6.4	12.8
setuju	33	70.2	70.2	83.0
sangat setuju	8	17.0	17.0	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
tidak setuju	3	6.4	6.4	8.5
kurang setuju	2	4.3	4.3	12.8
setuju	30	63.8	63.8	76.6
sangat setuju	11	23.4	23.4	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Tindakan koreksi sangat dibutuhkan dalam pengawasan APBD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Peran pengawasan memberikan tindakan koreksi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
setuju	26	55.3	55.3	55.3
sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

### 3. Hasil Uji Deskriptif → Kinerja Keuangan Daerah

**Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	25	53.2	53.2	66.0
sangat setuju	16	34.0	34.0	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	5	10.6	10.6	10.6
setuju	25	53.2	53.2	63.8
sangat setuju	17	36.2	36.2	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	3	6.4	6.4	6.4
kurang setuju	2	4.3	4.3	10.6
setuju	27	57.4	57.4	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	3	6.4	6.4	6.4
setuju	27	57.4	57.4	63.8
sangat setuju	17	36.2	36.2	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Penerapan prinsip transparan, efisien, ekonomis serta efektif mendapat dampak sikap puas dari masyarakat**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
tidak setuju	1	2.1	2.1	4.3
kurang setuju	4	8.5	8.5	12.8
setuju	28	59.6	59.6	72.3
sangat setuju	13	27.7	27.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Anggaran dikelola secara merata (equality) dan penggunaan dana public tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	1	2.1	2.1	2.1
setuju	30	63.8	63.8	66.0
sangat setuju	16	34.0	34.0	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Anggaran dikelola secara adil dimana ada kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
kurang setuju	1	2.1	2.1	4.3
setuju	24	51.1	51.1	55.3
sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

- **UJI ASUMSI K**

- 1) **Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstand ardized Residual
N		47
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.282605
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.071
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

- 2) **Uji Multikolinearitas → VIF <10.00**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.989	3.472		2.301	.026		
	TOTAL.X1	.288	.122	.314	2.349	.023	.672	1.488
	TOTAL.X2	.453	.132	.458	3.432	.001	.672	1.488

a. Dependent Variable: TOTAL.Pengelolaan.Anggaran

### 3) Uji Autokorelasi

Jumlah n = 47

Jumlah k (independen variabel) = 2

Nilai dL = 1.4435

Nilai dU = 1.6204

Nilai Dw = 2.381

Kesimpulan = Dw > dU (2.381 > 1.6204) = Tidak terdapat autokorelasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.688 <sup>a</sup>	.473	.449	2.099	2.381

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

- **UJI HIPOTESIS**

#### 1) Uji t → t table = 2.01537

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.989	3.472		2.301	.026
	TOTAL.X1	.288	.122	.314	2.349	.023
	TOTAL.X2	.453	.132	.458	3.432	.001

#### 2) Uji f → f table = 3.21

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173.932	2	86.966	19.735	.000 <sup>b</sup>
	Residual	193.898	44	4.407		
	Total	367.830	46			

### 3) Uji Koefisien Regresi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.688 <sup>a</sup>	.473	.449	2.099

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Surat Izin Penelitian
- LAMPIRAN II : Kuesioner Penelitian
- LAMPIRAN III : Tabulasi Data
- LAMPIRAN V : Hasil Olah Data SPSS

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN

- **UJI VALIDITAS ITEM ( $r$  table = 0.2876)**  
(Correlation is significant at the 0.05 level)

### 1. Validitas → Fungsi Anggaran

Correlations

		Anggota dewan melakukan taksiran pengeluaran dengan mengacu pada pendapatan yang tersedia dalam penyusunan APBD.	penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD.	Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah	APBD dimengerti oleh Bapak/ibu secara rinci	Dalam penyusunan APBD bapak/ibu tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan pemborosan, keridakefisienan anggaran serta overestimate pengeluaran	pelaporan APBD disajikan secara lengkap dan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya	Evaluasi yang dilakukan Anggota Dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD	TOTAL X1
Anggota dewan melakukan taksiran pengeluaran dengan mengacu pada pendapatan yang tersedia dalam penyusunan APBD.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .000 47	.523** .000 47	.466** .001 47	1.000** .000 47	.255 .083 47	.281 .056 47	.310* .034 47	.783** .000 47
penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.523** .000 47	1 .000 47	.572** .000 47	.523** .000 47	.383** .008 47	.239 .106 47	.545** .000 47	.787** .000 47
Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.466** .001 47	.572** .000 47	1 .000 47	.466** .001 47	.248 .093 47	.256 .083 47	.444** .002 47	.682** .000 47
APBD dimengerti oleh Bapak/ibu secara rinci	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1.000** .000 47	.523** .000 47	.466** .001 47	1 .000 47	.255 .083 47	.281 .056 47	.310* .034 47	.783** .000 47
Dalam penyusunan APBD bapak/ibu tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan pemborosan, keridakefisienan anggaran serta overestimate pengeluaran	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.255 .083 47	.383** .008 47	.248 .093 47	.255 .083 47	1 .109 47	.237 .100 47	.243 .100 47	.607** .000 47

pelaporan APBD disajikan secara lengkap dan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya	Pearson Correlation	.281	.239	.256	.281	.237	1	.326*	.515**
	Sig. (2-tailed)	.056	.106	.083	.056	.109		.025	.000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
Evaluasi yang dilakukan Anggota Dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD	Pearson Correlation	.310*	.545**	.444**	.310*	.243	.326*	1	.654**
	Sig. (2-tailed)	.034	.000	.002	.034	.100	.025		.000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
TOTAL.X1	Pearson Correlation	.783**	.787**	.682**	.783**	.607**	.515**	.654**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	47	47	47	47	47	47	47	47

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Validitas → Fungsi Pengawasan

Correlations

		Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan, mensosialisasikan APBD yang telah disusun pihak pemerintah	Adanya dukungan pendanaan dapat membantu anggota dewan dalam melakukan pengawasan APBD	Bapak/ibu mengetahui apabila terjadi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran pemerintah pada tahun berjalan	Adanya motivasi mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan jika terjadi kejanggalaan dalam pelaksanaan APBD	Keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan pengawasan	Anggota dewan mengawasi dan mengusut serta menindaklanjuti jika terjadi kejanggalaan dalam LPJ APBD	Anggota dewan melakukan salah satu model pengawasan yaitu preventif, represif, investigasi, internal dan eksternal	TOTAL X2
Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan, mensosialisasikan APBD yang telah disusun pihak pemerintah	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .000 47	.488** .000 47	.285 .052 47	.525** .000 47	.160 .283 47	.230 .120 47	.383** .008 47	.705** .000 47
Adanya dukungan pendanaan dapat membantu anggota dewan dalam melakukan pengawasan APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.488** .000 47	1 .000 47	.224 .129 47	.289* .049 47	.461** .001 47	-.020 .894 47	.117 .434 47	.615** .000 47
Bapak/ibu mengetahui apabila terjadi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran pemerintah pada tahun berjalan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.285 .052 47	.224 .129 47	1 .000 47	.103 .492 47	.325* .026 47	-.014 .925 47	-.148 .321 47	.462** .001 47
Adanya motivasi mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan jika terjadi kejanggalaan dalam pelaksanaan APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.525** .000 47	.289* .049 47	.103 .492 47	1 .000 47	.117 .433 47	.420** .003 47	.347* .017 47	.634** .000 47
Keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan pengawasan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.160 .283 47	.461** .001 47	.325* .026 47	.117 .433 47	1 .106 47	.239 .106 47	.152 .308 47	.634** .000 47
Anggota dewan mengawasi dan mengusut serta menindaklanjuti jika terjadi kejanggalaan dalam LPJ APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.230 .120 47	-.020 .894 47	-.014 .925 47	.420** .003 47	.239 .106 47	1 .106 47	.681** .000 47	.579** .000 47

Anggota dewan melakukan salah satu model pengawasan yaitu preventif, represif, investigasi, internal dan eksternal.	Pearson Correlation	.383**	.117	-.148	.347*	.152	.681**	1	.569**
	Sig. (2-tailed)	.008	.434	.321	.017	.308	.000		.000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
TOTAL.X2	Pearson Correlation	.705**	.615**	.462**	.634**	.634**	.579**	.569**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Validitas → Pengelolaan Anggaran

Correlations

		Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan.	DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD	Pengelolaan anggaran dilakukan	Transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat	Pengendalian intern dapat meningkatkan efisiensi, keandalan informasi keuangan, dan kepatuhan pada hukum atau peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran	Pengelolaan anggaran dilakukan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif	Pengelolaan anggaran selalu dilakukan secara periodik (bersifat tahunan atau multi tahunan)	TOTALY
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .266 47	.266 .071 47	.187 .209 47	.295* .044 47	.250 .090 47	.197 .185 47	.187 .209 47	.500** .000 47
DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.266 .071 47	1 .071 47	.283 .054 47	.373** .010 47	.278 .058 47	.245 .097 47	.283 .054 47	.538** .000 47
Pengelolaan anggaran dilakukan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.187 .209 47	.283 .054 47	1 .000 47	.586** .000 47	.493** .000 47	.403** .005 47	1.000** .000 47	.842** .000 47
Transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.295* .044 47	.373** .010 47	.586** .000 47	1 .000 47	.535** .000 47	.299* .041 47	.586** .000 47	.758** .000 47
Pengendalian intern dapat meningkatkan efisiensi, keandalan informasi keuangan, dan kepatuhan pada hukum atau peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.250 .090 47	.278 .058 47	.493** .000 47	.535** .000 47	1 .000 47	.493** .000 47	.493** .000 47	.722** .000 47

Pengelolaan anggaran dilakukan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif	Pearson Correlation	.197	.245	.403**	.299*	.493**	1	.403**	.615**
	Sig. (2-tailed)	.185	.097	.005	.041	.000		.005	.000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
Pengelolaan anggaran selalu dilakukan secara periodik (bersifat tahunan atau multi tahunan)	Pearson Correlation	.187	.283	1.000**	.586**	.493**	.403**	1	.842**
	Sig. (2-tailed)	.209	.054	.000	.000	.000	.005		.000
	N	47	47	47	47	47	47	47	47
TOTAL Y	Pearson Correlation	.500**	.538**	.842**	.756**	.722**	.615**	.842**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	47	47	47	47	47	47	47	47

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- **UJI RELIABILITAS ITEM**

1. **Reliabilitas → Fungsi Anggaran ( $\alpha > 0.50$ )**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	47	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	7

2. **Reliabilitas → Fungsi Pengawasan ( $\alpha > 0.50$ )**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	47	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.693	7

### 3. Reliabilitas → Pengelolaan Anggaran ( $\alpha > 0.50$ )

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	47	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	47	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	7

- **UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

- **Deskriptif Responden**

**jenis kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	34	72.3	72.3	72.3
	Perempuan	13	27.7	27.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23 tahun	1	2.1	2.1	2.1
	25 tahun	1	2.1	2.1	4.3
	31 tahun	3	6.4	6.4	10.6
	32 tahun	1	2.1	2.1	12.8
	33 tahun	1	2.1	2.1	14.9
	34 tahun	2	4.3	4.3	19.1
	37 tahun	1	2.1	2.1	21.3
	38 tahun	1	2.1	2.1	23.4
	39 tahun	2	4.3	4.3	27.7
	40 tahun	4	8.5	8.5	36.2
	41 tahun	2	4.3	4.3	40.4
	43 tahun	2	4.3	4.3	44.7
	44 tahun	1	2.1	2.1	46.8
	45 tahun	1	2.1	2.1	48.9
	47 tahun	2	4.3	4.3	53.2
	48 tahun	1	2.1	2.1	55.3
	49 tahun	1	2.1	2.1	57.4
	50 tahun	2	4.3	4.3	61.7
	51 tahun	1	2.1	2.1	63.8
	53 tahun	3	6.4	6.4	70.2
	54 tahun	1	2.1	2.1	72.3
	55 tahun	2	4.3	4.3	76.6
	56 tahun	1	2.1	2.1	78.7
	57 tahun	2	4.3	4.3	83.0
	58 tahun	2	4.3	4.3	87.2
	61 tahun	1	2.1	2.1	89.4
	62 tahun	1	2.1	2.1	91.5
63 tahun	2	4.3	4.3	95.7	
67 tahun	1	2.1	2.1	97.9	
71 tahun	1	2.1	2.1	100.0	
Total		47	100.0	100.0	

**pendidikan terakhir**

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Diploma (D3)	3	6.4	6.4	6.4
	Megister (S2)	10	21.3	21.3	27.7
	Sarjana (S1)	26	55.3	55.3	83.0
	SMA	8	17.0	17.0	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**masa kerja**

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	1 tahun	1	2.1	2.1	2.1
	6 tahun	1	2.1	2.1	4.3
	1 tahun	19	40.4	40.4	44.7
	10 tahun	3	6.4	6.4	51.1
	11 tahun	4	8.5	8.5	59.6
	12 tahun	1	2.1	2.1	61.7
	13 tahun	1	2.1	2.1	63.8
	20 tahun	1	2.1	2.1	66.0
	22 tahun	2	4.3	4.3	70.2
	27 tahun	1	2.1	2.1	72.3
	6 tahun	8	17.0	17.0	89.4
	7 tahun	4	8.5	8.5	97.9
	9 tahun	1	2.1	2.1	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

- **Deskriptif Item Pernyataan**

1. **Hasil Uji Deskriptif → Fungsi Anggaran**

**Anggota dewan melakukan taksiran pengeluaran dengan mengacu pada pendapatan yang tersedia dalam penyusunan APBD.**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**penyusunan APBD harus terstruktur dimulai dari penyusunan KUA, PPAS, Raperda APBD.**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
kurang setuju	2	4.3	4.3	6.4
setuju	22	46.8	46.8	53.2
sangat setuju	22	46.8	46.8	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Dalam pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan yang berlaku atau peraturan dasar hukum penyelenggara keuangan daerah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	26	55.3	55.3	55.3
sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**APBD dimengerti oleh Bapak/ibu secara rinci**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Dalam penyusunan APBD bapak/ibu tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan pemborosan, keridakefisienan anggaran serta overestimate pengeluaran**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
tidak setuju	2	4.3	4.3	6.4
kurang setuju	10	21.3	21.3	27.7
setuju	22	46.8	46.8	74.5
sangat setuju	12	25.5	25.5	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**pelaporan APBD disajikan secara lengkap dan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	2	4.3	4.3	4.3
setuju	30	63.8	63.8	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Evaluasi yang dilakukan Anggota Dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
kurang setuju	4	8.5	8.5	10.6
setuju	27	57.4	57.4	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

## 2. Hasil Uji Deskriptif → Fungsi Pengawasan

**Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan, mensosialisasikan APBD yang telah disusun pihak pemerintah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	5	10.6	10.6	10.6
setuju	26	55.3	55.3	66.0
sangat setuju	16	34.0	34.0	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Adanya dukungan pendanaan dapat membantu anggota dewan dalam melakukan pengawasan APBD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
kurang setuju	4	8.5	8.5	10.6
setuju	29	61.7	61.7	72.3
sangat setuju	13	27.7	27.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Bapak/ibu mengetahui apabila terjadi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran pemerintah pada tahun berjalan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
tidak setuju	2	4.3	4.3	6.4
kurang setuju	3	6.4	6.4	12.8
setuju	33	70.2	70.2	83.0
sangat setuju	8	17.0	17.0	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Adanya motivasi mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan jika terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan APBD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan pengawasan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
	tidak setuju	3	6.4	6.4	8.5
	kurang setuju	2	4.3	4.3	12.8
	setuju	30	63.8	63.8	76.6
	sangat setuju	11	23.4	23.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Anggota dewan mengawasi dan mengusut serta menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
	kurang setuju	1	2.1	2.1	4.3
	setuju	26	55.3	55.3	59.6
	sangat setuju	19	40.4	40.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Anggota dewan melakukan salah satu model pengawasan yaitu preventif, represif, investigasi, internal dan eksternal.**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	2	4.3	4.3	4.3
	setuju	30	63.8	63.8	68.1
	sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

### 3. Hasil Uji Deskriptif → Pengelolaan Anggaran

**Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan.**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	12.8	12.8	12.8
setuju	26	55.3	55.3	68.1
sangat setuju	15	31.9	31.9	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	26	55.3	55.3	55.3
sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Pengelolaan anggaran dilakukan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	2.1	2.1	2.1
3	2	4.3	4.3	6.4
4	23	48.9	48.9	55.3
5	21	44.7	44.7	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	2	4.3	4.3	4.3
setuju	27	57.4	57.4	61.7
sangat setuju	18	38.3	38.3	100.0
Total	47	100.0	100.0	

**Pengendalian intern dapat meningkatkan efisiensi, keandalan informasi keuangan, dan kepatuhan pada hukum atau peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	3	6.4	6.4	6.4
	setuju	31	66.0	66.0	72.3
	sangat setuju	13	27.7	27.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Pengelolaan anggaran dilakukan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	1	2.1	2.1	2.1
	setuju	25	53.2	53.2	55.3
	sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

**Pengelolaan anggaran selalu dilakukan secara periodik (bersifat tahunan atau multi tahunan)**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	2.1	2.1	2.1
	kurang setuju	2	4.3	4.3	6.4
	setuju	23	48.9	48.9	55.3
	sangat setuju	21	44.7	44.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

- **UJI ASUMSI KLASIK**

- 1) Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstand ardized Residual
N		47
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.282605
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.071
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

- 2) Uji Multikolinearitas → VIF < 10.00

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.088	3.980		2.535	.015		
	TOTALX1	.343	.119	.377	2.881	.006	.832	1.202
	TOTALX2	.347	.130	.351	2.680	.010	.832	1.202

a. Dependent Variable: TOTALY

### 3) Uji Autokorelasi

Jumlah n = 47

Jumlah k (independen variabel) = 2

Nilai dL = 1.4435

Nilai dU = 1.6204

Nilai Dw = 2.370

Kesimpulan = Dw > dU (2.370 > 1.6204) = Tidak terdapat autokorelasi.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.611 <sup>a</sup>	.373	.345	2.334	2.370

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

b. Dependent Variable: TOTAL.Y

- **UJI HIPOTESIS**

1) Uji t → t table = 2.01537

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.088	3.980		2.535	.015
	TOTAL.X1	.343	.119	.377	2.881	.006
	TOTAL.X2	.347	.130	.351	2.680	.010

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

2) Uji f → f tabel = 3.21

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	142.880	2	71.440	13.115	.000 <sup>b</sup>
	Residual	239.673	44	5.447		
	Total	382.553	46			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

3) Uji Koefisien Regresi Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.611 <sup>a</sup>	.373	.345	2.334	2.370

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

b. Dependent Variable: TOTAL.Y